



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MAJALAH WARTA PEMERIKSA
FEBRUARI 2024

wfp



BPK SOROTI PENYALURAN SUBSIDI DAN KOMPENSASI UNTUK BUMN

Persoalan *dispute* BUMN dengan kementerian/lembaga juga menjadi sorotan BPK.

Dalam edisi Februari 2024, redaksi menyiapkan laporan mengenai upaya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawal penyaluran subsidi dan pembayaran kompensasi untuk badan usaha milik negara (BUMN). Beberapa area yang menjadi sorotan, antara lain terkait subsidi, kompensasi, dan penyertaan modal negara (PMN). Kemudian, mengenai ekuitas BUMN, utamanya 18 entitas dengan nilai dan risiko tinggi, dividen, PNBP Migas dan *cost recovery*, serta barang milik negara (BMN) yang dikelola KKKS.

Persoalan belanja kompensasi dan subsidi patut menjadi perhatian dalam pemeriksaan BPK. Hal ini karena belanja kompensasi BBM dan listrik pada 2022 naik drastis ke level Rp352 triliun. Angka ini bahkan melebihi total subsidi untuk semua sektor yang mencapai Rp245 triliun.

Di rubrik BPK Bekerja, redaksi juga menyiapkan mengenai pemeriksaan terhadap *holding* industri pertahanan (DEFEND ID). Dalam pemeriksaan terlihat bahwa pemberdayaan industri pertahanan di DEFEND ID belum sepenuhnya sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Redaksi juga menyampaikan laporan mengenai pemeriksaan terhadap Bio Farma pada masa pandemi Covid-19. Dalam pemeriksaan, BPK menemukan berbagai capaian positif Bio Farma. Meskipun begitu, ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian.

Jangan lewatkan juga laporan redaksi mengenai Perpustakaan BPK yang telah mendapatkan akreditasi tingkat A. Akreditasi ini bukan hanya sekadar prestasi semata, tetapi juga merupakan tonggak penting dalam upaya meningkatkan kepercayaan pemustaka serta konsistensi kualitas pelayanan perpustakaan tersebut.

Simak juga laporan redaksi mengenai efektivitas Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di bawah naungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Pemerintah Kota Jambi. Pembaca bisa melihat bagaimana BPK Perwakilan Provinsi Jambi menggunakan tiga kriteria utama dalam melakukan pemeriksaan ini.

Masih banyak laporan lain yang telah redaksi siapkan. Selamat menikmati.

SOROTAN	4	BPK Soroti Penyaluran Subsidi dan Kompensasi untuk BUMN
BPK BEKERJA	8	Mewujudkan DEFEND ID yang Lebih Mandiri
	12	Mengawal Keuangan Bio Farma di Masa Pandemi Covid-19
SHARING KNOWLEDGE	17	Akreditasi Perpustakaan BPK dan Platform Study Buddy
BPK PERWAKILAN	24	Meningkatkan Peran Mal Pelayanan Publik di Kota Jambi
BEDAH BUKU	28	Rahasia Komunikasi yang Efektif
SUDUT PANDANG	32	Memperkuat Tata Kelola BUMN
KESEHATAN	35	<i>Self-Love</i> , Pentingnya Mencintai Diri Sendiri
TEKNOLOGI	37	Optimalisasi Posisi BIDICS dalam Struktur Organisasi
KILAS	42	Ketua BPK Ingatkan BI, OJK, dan LPS Terus Perkuat Tata Kelola
	45	Serahkan Dua LHP PKN ke Jaksa Agung, BPK Ungkap Kerugian Negara Sebesar Rp101,84 Miliar
	47	Berikan Kuliah Umum, Anggota I Tekankan Pentingnya Kepemimpinan dan Tata Kelola Keuangan Negara
	49	BPK Telisik Lima Area Berisiko dalam Pemeriksaan LK
	51	Anggota V BPK: Opini WTP Bukan Tujuan Akhir
	53	Pemeriksaan LK Difokuskan pada Area-Area Berisiko
KOLOM	55	Peran BPK Sebagai Institusi Penyelaras dalam Interoperabilitas Alpalhankam TNI

Pengarah Isma Yatun, Hendra Susanto, Nyoman Adhi Suryadnyana, Daniel Lumban Tobing, Haerul Saleh, Ahmadi Noor Supit, Pius Lustrilanang, Slamet Edy Purnomo, **Penanggung Jawab** Bahtiar Arif, **Wakil Penanggung Jawab** R. Yudi Ramdan Budiman, **Ketua Tim Redaksi** Sri Haryati, **Kepala Sekretariat** Bestantia Indraswati, **Sekretariat** Fitri Yuliantri Permana, Klara Ransingin, Ridha Sukma, Ratna Tri Darmayanti, Apriyana, Sudarman, **Alamat Sekretariat** Gedung BPK RI Jalan Gatot Subroto no 31, Jakarta, **Telepon** 021-25549000 Pesawat 1188/1187, **Email** wartapemeriksa@bpk.go.id
Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

bpk.go.id



Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.
(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

BPK Soroti Penyaluran Subsidi dan Kompensasi untuk BUMN



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawal penyaluran subsidi dan pembayaran kompensasi untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti diketahui, status BUMN sebagai bagian dari keuangan negara sudah ditegaskan secara yuridis formal melalui UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maupun secara perspektif hukum positif pada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Dalam lingkup pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VII BPK, terdapat beberapa area yang perlu menjadi sorotan. Hal itu antara lain terkait subsidi, kompensasi, dan penyertaan modal negara (PMN). Kemudian, mengenai ekuitas BUMN

utamanya 18 BUMN dengan nilai dan risiko tinggi, dividen, PNBPN Migas dan *cost recovery*, serta Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KKKS.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII/Anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo menyampaikan, persoalan belanja kompensasi dan subsidi patut menjadi perhatian dalam pemeriksaan BPK. Dia mengungkapkan, belanja kompensasi BBM dan listrik pada 2022 naik drastis ke level Rp352 triliun. Angka ini bahkan melebihi total subsidi untuk semua sektor yang mencapai Rp245 triliun.

"Subsidi memang ditargetkan untuk (masyarakat) kurang mampu, namun untuk kompensasi nyatanya lebih banyak dinikmati kalangan mampu," ungkap Slamet.



Pada 2022, dana kompensasi BBM mencapai Rp288 triliun. Angka itu empat kali lipat dibanding tahun 2021 yang sebesar Rp68 triliun. Slamet pun menilai perlu ada mekanisme pembatasan kuota, jenis kendaraan, maupun orang yang bisa membelinya karena dapat memberatkan APBN.

"Atas kompensasi BBM dan listrik ini maka Pertamina, PLN, Kementerian BUMN bersama dengan Kemenkeu dan Kementerian ESDM harus segera mendorong penyesuaian dengan harga yang sifatnya *forward looking* agar neraca pemerintah maupun BUMN lebih sehat," ujarnya.

Terkait subsidi pupuk, terdapat kenaikan subsidi pupuk pada 2022 mencapai Rp40 triliun dengan volume mencapai 7,59 juta ton. Namun, nyatanya, masih banyak kelangkaan di masyarakat dan hal ini menimbulkan keresahan. Slamet mendorong Kementerian BUMN berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk meminalisasi penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi ini.

▲
Entry meeting pemeriksaan pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan BUMN, di kantor pusat BPK, Senin (15/1). Entry meeting yang dipimpin Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo tersebut turut dihadiri Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing, Anggota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Haerul Saleh, Menteri BUMN Erick Thohir.

"Subsidi memang ditargetkan untuk (masyarakat) kurang mampu, namun untuk kompensasi nyatanya lebih banyak dinikmati kalangan mampu."

Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo

Secara umum, ungkap Slamet, terdapat empat risiko utama dalam penyaluran subsidi dan kompensasi yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Hal itu yakni Risiko Kepatuhan, Risiko Bisnis, Risiko Operasional, dan Risiko Kebijakan.

Slamet juga menyampaikan adanya risiko pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Beberapa risiko yang dapat diidentifikasi yaitu pengakuan pendapatan dan beban yang diakui oleh KAP di dalam LK BUMN tidak wajar dan tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian, dapat disoroti kesesuaian opini yang diberikan oleh KAP serta risiko opini atas LK BUMN tidak selaras dengan Tingkat Kesehatan, Predikat, dan Permasalahan di dalam BUMN.

Persoalan *dispute* BUMN dengan kementerian/lembaga juga menjadi sorotan Slamet. Dia menyampaikan, terdapat sebanyak 36 permasalahan antara BUMN/KKKS dengan kementerian/lembaga senilai Rp41,62 triliun. Selain itu ada juga 39 permasalahan antar-BUMN dengan total nilai Rp13,84 triliun.

Sebelumnya, Slamet menyampaikan, persoalan *dispute* terjadi dalam isu tarif listrik. Isu tidak hanya melibatkan PT PLN (Persero) sebagai operator, tapi juga ada keterkaitan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sehingga, AKN VII harus intens berkolaborasi dengan AKN IV yang menaungi kementerian tersebut.

Saat ini, ungkap Slamet, AKN VII juga tengah melakukan investarisasi perselisihan atau *dispute* antar-BUMN. Dia menyampaikan, *dispute* ini kerap terjadi karena terjadi transaksi utang piutang antar-BUMN.

"Yang satu merasa punya tagihan, yang satu merasa punya utang sehingga muncullah *dispute*. Ini kita coba selesaikan," ujarnya.

Slamet kembali menegaskan, kunci untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah dengan berkoordinasi dengan AKN lain. Dia menyoroti, sejumlah rekomendasi yang diberikan selama ini masih bersifat parsial. Contohnya, AKN VII memberikan rekomendasi pada suatu BUMN sementara kebijakan tersebut berada di lingkup kementerian teknis. Hal ini kemudian membuat rekomendasi tidak bisa ditindaklanjuti oleh entitas.

Slamet pun mendorong agar seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK sudah terkonsolidasi dan memperhatikan *concern* dari AKN lain. Ini juga sejalan dengan proses bisnis BUMN yang kini saling terintegrasi dengan berbagai pihak.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



BPK RI Official



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)



wartapemeriksa.bpk.go.id



Mewujudkan DEFEND ID yang Lebih Mandiri

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pemberdayaan Industri Pertahanan pada *Holding* Industri Pertahanan, Anak Perusahaan dan Turunannya, serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Jawa Barat. *Holding* industri pertahanan atau disebut dengan nama DEFEND ID bertanggung jawab menyelenggarakan usaha di bidang pertahanan dan keamanan maupun non-industri pertahanan dalam rangka memenuhi kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) khususnya dalam negeri, meningkatkan daya saing, menciptakan sinergi, dan memperoleh keuntungan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa pemberdayaan industri pertahanan pada DEFEND ID belum



DEFEND.ID

sempurnya sesuai dan memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku. BPK pun melihat bahwa pemerintah telah berupaya memberdayakan *holding* BUMN untuk melaksanakan amanat dari UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan antara lain melalui insentif fiskal, pembebasan bea masuk dan pajak, jaminan, pendanaan, dan/atau pembiayaan.

Akan tetapi, perhatian yang telah diberikan belum dapat memberikan kemandirian bagi DEFEND ID dalam menunjang operasional perusahaan secara berkelanjutan dan mewujudkan *holding* BUMN pertahanan yang maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing.

"DEFEND ID membutuhkan dukungan skema pemesanan yang berkelanjutan atas produk-produk unggulan untuk mencapai status kematangan teknologi terbaik yang diinginkan dan *combat-proven* dan dukungan finansial dari pemerintah

untuk merevitalisasi dan memodernisasi peralatan dan mesin yang pada umumnya telah *obsolete*," ungkap BPK.

Dari pemeriksaan yang dilakukan pada semester I 2023 itu, BPK menyampaikan sejumlah capaian positif dari DEFEND ID. Hal itu antara lain DEFEND ID telah melakukan kegiatan persiapan pembentukan *holding*, sosialisasi tata kelola, pembentukan *council meeting* dan diskusi tim integrasi serta antar *leader holding*, penjabaran dan penentuan *threshold* Surat Kuasa Khusus (SKK), penyusunan pedoman strategis tata kelola hubungan kerja, dan pembentukan forum direksi.

Selain itu, DEFEND ID juga telah melakukan *recovery* kinerja tahun 2022 dibanding tahun 2021 dan 2020 antara lain melalui restrukturisasi pinjaman, perbaikan struktur permodalan, restrukturisasi korporasi, dan pendanaan modal kerja dari penjaminan pemerintah.

Meski terdapat capaian positif, BPK menemukan sejumlah permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian. Hal itu yakni kemampuan DEFEND ID tidak memadai dalam mewujudkan *holding* pertahanan yang maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.



DEFEND.ID



DEFEND.ID



DEFEND.ID

Hal tersebut dapat dilihat antara lain dari arus kas yang tidak sehat, penguasaan rantai pasok belum tercapai, kesiapan peralatan dan mesin belum memadai, *technology readiness level* produk unggulan belum mempresentasikan nilai senyatanya, dan *research and development* belum berjalan secara memadai. BPK pun menyebut DEFEND ID belum mampu secara keuangan untuk secara mandiri merevitalisasi, memodernisasi, dan menambah kapasitas peralatan dan mesin yang dimiliki.

BPK juga mengungkapkan bahwa penyerapan produk industri pertahanan belum maksimal. Pasal 8 UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mewajibkan pengguna dalam hal ini Kementerian Pertahanan untuk menggunakan alpalhankam yang telah dapat diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri sehingga mendorong terwujudnya kemandirian industri pertahanan.



PINDAD.COM

Akan tetapi, pesanan yang diterima DEFEND ID dari pemerintah terhadap produk-produk yang dihasilkan masih rendah. DEFEND ID membutuhkan kepastian pemesanan yang berkelanjutan dari pemerintah sehingga produk-produk unggulan yang dikembangkan secara mandiri dapat memperoleh tingkat teknologi yang diinginkan dan menjadi *combatting proven*.

Apabila kondisi ini terus berlanjut, akan terdapat risiko bahwa segala aset dan kekuatan yang saat ini dimiliki yang berasal dari puluhan tahun rangkaian proses konstruksi, perubahan, redefinisi dan rekonstruksi industri pertahanan di Indonesia menjadi tidak optimal pemanfaatannya dalam mencapai tujuan kemandirian negara.

DEFEND ID pun sulit memenuhi TKDN karena ketergantungan akan bahan baku dari luar negeri. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan pada Pasal 38 ayat 2 yang mewajibkan industri pertahanan untuk mengutamakan penggunaan bahan mentah, bahan baku, dan komponen dalam negeri.

Akan tetapi, tingginya ketergantungan DEFEND ID akan material impor disebabkan belum tumbuhnya industri hulu dalam negeri untuk mendukung DEFEND ID. Secara khusus, upaya positif yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan untuk mewujudkan ekosistem pabrik propelan di Indonesia dengan membangun pabrik *Nitric Acid Concentrated/ Sulfuric Acid Concentrated* dan Nitrogliserin senilai Rp670 miliar yang saat ini sama sekali belum dapat dimanfaatkan akan berpotensi merugikan negara apabila tidak didukung dengan pabrik *Spherical Powder*.

BPK menyampaikan, pembentukan *holding* DEFEND ID bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan industri pertahanan yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi, dan inovatif sesuai amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Akan tetapi, peran DEFEND ID selaku *holding* industri pertahanan belum berjalan sesuai harapan. Selama tahun 2022, PT Len Industri belum merepresentasikan diri sebagai induk dari DEFEND ID.

Upaya yang dilakukan baru berfokus untuk mengupayakan penyehatan entitas *holding* dan integrasi antarentitas *holding*. Sehingga, belum terdapat kebijakan strategis dan teknis yang bersifat formal dan akan menjadi pedoman bagi DEFEND ID dalam menjalankan *holding* antara lain struktur organisasi dan tata kelola organisasi yang mencakup kewenangan dan hubungan kerja antara *holding* dan anggota *holding* serta sesama anggota *holding*, perencanaan, pengembangan produk, proses produksi dan pemasaran.





Mengawal Keuangan Bio Farma di Masa Pandemi Covid-19

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2020 Sampai Dengan 2022 (Semester I) pada PT Bio Farma (Persero) dan Anak Perusahaan Serta Instansi Terkait Lainnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Tahun 2020 sampai dengan 2022 (Semester I) pada PT Bio Farma (Persero) dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.



BPMI SETPRES/LAILY RACHEV

◀
Presiden Jokowi
tinjau fasilitas
PT Bio Farma
(Persero) Bandung,
Kamis (13/10/2022).

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat capaian positif pada PT Bio Farma (Persero) dan Anak Perusahaan dalam mendukung program pemerintah menangani Covid-19. Bio Farma berhasil melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk mengadakan, mereproduksi, dan mendistribusikan vaksin Covid-19 ke seluruh wilayah Indonesia khususnya selama masa pandemi pada 2020 sampai 2022.

Bio Farma pun secara keuangan telah berhasil mencatat laba bersih tahun 2021 sebesar Rp1.931,29 miliar, melonjak 567,84 persen dibanding 2020 yang sebesar Rp289,19 miliar. Sebagian besar kenaikan laba tersebut berasal dari penjualan atas pelaksanaan amanat pemerintah dalam mengadakan, mereproduksi, dan mendistribusikan vaksin Covid-19.

Di luar pencapaian positif itu, BPK menemukan sejumlah permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan

perhatian. Hal itu yakni target vaksinasi gotong royong (VGR) tidak tercapai sesuai rencana dan sisa vaksin berpotensi *expired* dan membebani keuangan perusahaan minimal sebesar Rp525,18 miliar.

Kondisi tersebut disebabkan oleh ketidakkonsistenan Pemerintah dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 terkait penugasan pengadaan VGR, yang mengubah sasaran penerima VGR. Kemudian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 terkait Vaksinasi Program memberikan vaksin gratis kepada seluruh masyarakat bersamaan dengan perintah pelaksanaan program VGR berbayar melalui badan hukum/badan usaha (BH/BU).

Atas permasalahan tersebut, Direktur Utama Bio Farma menyatakan menerima temuan pemeriksaan BPK. Bio Farma beserta anak perusahaan masih terus melakukan berbagai upaya agar sisa persediaan vaksin Gotong Royong dapat terjual. Upaya yang telah dilakukan antara lain mengusahakan Vaksin Gotong Royong menjadi vaksin regular yang langsung dapat di jual ke fasilitas Kesehatan untuk memperluas cakupan vaksinasi.

Terkait dengan vaksin yang berpotensi kedaluwarsa, Bio Farma melalui Kimia Farma selaku pemegang Nomor Izin Edar (NIE) melakukan perpanjangan masa *shelf life* kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara berkala.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi Bio Farma agar berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN untuk melakukan upaya-upaya yang optimal dalam memastikan adanya penyerapan VGR dengan memperhatikan masa kedaluwarsa vaksin tersebut dalam rangka meminimalisasi terjadinya kerugian perusahaan.

"Bio Farma pun secara keuangan telah berhasil mencatat laba bersih tahun 2021 sebesar Rp1.931,29 miliar, melonjak 567,84 persen dibanding 2020 yang sebesar Rp289,19 miliar. Sebagian besar kenaikan laba tersebut berasal dari penjualan atas pelaksanaan amanat pemerintah dalam mengadakan, mereproduksi, dan mendistribusikan vaksin Covid-19."

BPK juga mengungkap potensi kerugian keuangan perusahaan atas bahan baku tambahan *Cytosine Phosphoguanine* yang belum dimanfaatkan sebanyak 15.038,60 gram atau senilai Rp225,01 miliar. Sebagai BUMN produsen vaksin di Indonesia, Bio Farma turut serta mengembangkan vaksin Covid-19 dalam rangka memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri.

Vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh Bio Farma berasal dari kandidat vaksin subunit protein rekombinan Receptor Binding Domain (RBD) SARS-CoV-2 yang diekspresikan di yeast atau ragi. Dalam pengembangan formulasi vaksin Covid-19, Bio Farma menggunakan dua jenis *adjuvant*, yaitu *alum* dan *Cytosine Phosphoguanine* (CpG) 1018.

Cytosine Phosphoguanine atau CpG adalah bentuk sintesis dari DNA yang meniru material genetik bakteri dan virus. Penggunaan CpG ditujukan untuk memberikan respon imun yang lebih baik sehingga vaksin cukup diberikan dengan dua kali suntikan.

Potensi kerugian tersebut muncul lantaran Direksi Bio Farma memutuskan dan menyetujui opsi untuk pemesanan CpG dengan target penjualan 20 juta dosis hanya berdasarkan justifikasi bisnis walaupun pada saat itu belum terdapat kejelasan atas penjualan vaksin dan kepastian penyerapan vaksin oleh Pemerintah.



BIOFARMA.CO.ID

Atas permasalahan tersebut, Direktur Utama Bio Farma menyatakan menerima temuan pemeriksaan BPK. Keputusan Rapat Direksi tanggal 7 Februari 2022 tentang pengadaan CpG sebanyak 24,5 kg dilakukan untuk tujuan komersial guna memenuhi kebutuhan produksi Vaksin IndoVac.

Terkait dengan sisa CpG yang belum terserap sebesar Rp225.019.281.588 akan digunakan untuk produksi Vaksin IndoVac menyesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri terutama melalui skema penugasan dari pemerintah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi Bio Farma agar berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan produksi



BIOFARMA.CO.ID

dan penjualan vaksin IndoVac kepada pemerintah sehingga sisa CpG yang belum digunakan dapat terserap. Selain itu, direksi perlu mengusulkan adanya skema *buffer stock* vaksin Covid-19 dalam rangka memitigasi risiko penyebaran pandemi Covid-19 secara berkelanjutan.

Sementara itu, pemeriksaan itu juga mengungkapkan terdapat permasalahan berulang dalam penetapan dan perhitungan harga pokok produksi (HPP) yang mengakibatkan harga produk tidak kompetitif dan berisiko merugikan Kimia Farma.

BPK menyatakan hal itu disebabkan oleh perbaikan sistem akuntansi berdasarkan rekomendasi BPK terdahulu, baru difokuskan pada pengembangan SAP namun belum mempertimbangkan esensi munculnya rekomendasi BPK dan relevansi pengembangan SAP untuk menyusun HPP aktual berdasarkan data yang akurat, valid, dan *up to date* serta sesuai dengan praktik-praktik akuntansi bisnis yang berlaku umum. Kemudian, sulitnya Kimia Farma untuk mengambil keputusan dalam pengadaan e-katalog yang bersifat kaku dihadapkan dengan lingkungan bisnis yang senantiasa berubah.

Atas permasalahan tersebut, Direktur Utama Kimia Farma menyatakan menerima temuan pemeriksaan dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK. BPK pun merekomendasikan kepada Direktur Utama Bio Farma agar melakukan perbaikan sistem penentuan HPP dengan menyusun HPP aktual berdasarkan data yang akurat, valid, dan *up to date* serta sesuai dengan praktik-praktik akuntansi bisnis yang berlaku umum.

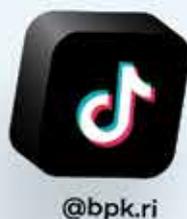
Dirut Kimia Farma juga perlu berkoordinasi di antara entitas *holding* dalam menentukan *principal* atau *supplier* yang potensial untuk diikat dengan kontrak payung guna menghasilkan pengadaan barang yang efisien.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di atas, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun 2020 sampai dengan 2022 (Semester I) pada PT Bio Farma (Persero) dan anak perusahaan, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material.



BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

BPK RI Official



wartapemeriksa.bpk.go.id

Akreditasi Perpustakaan BPK dan Platform Study Buddy



Perpustakaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) meraih pencapaian yang membanggakan dengan memperoleh akreditasi tingkat A. Akreditasi ini bukan hanya sekadar prestasi semata, tetapi juga merupakan tonggak penting dalam upaya meningkatkan kepercayaan pemustaka serta konsistensi kualitas pelayanan perpustakaan tersebut.

Tujuan akreditasi sendiri tidak hanya terbatas pada penilaian mutu internal, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perpustakaan serta menjamin konsistensi dalam kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, pencapaian akreditasi A oleh Perpustakaan BPK RI menjadi bukti nyata bahwa standar nasional perpustakaan telah terpenuhi dan layanan prima telah diberikan kepada pemustaka, baik internal maupun eksternal.

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan Perpustakaan BPK RI telah mencapai puncak keberhasilan dengan memperoleh akreditasi A. Ia menyebut ini sebuah prestasi yang patut dirayakan oleh seluruh elemen yang terlibat dalam kesuksesan ini.

"Pencapaian akreditasi A adalah bukti nyata bahwa Perpustakaan BPK RI telah menetapkan standar nasional perpustakaan yang khusus dan berhasil mewujudkan pelayanan prima bagi pemustaka, baik itu internal maupun eksternal," ucap dia.

Sekjen BPK Bahtiar Arif menyampaikan harapannya agar layanan perpustakaan BPK terus ditingkatkan semaksimal mungkin. Layanan yang baik, cepat, dan memberikan referensi yang dibutuhkan bagi masyarakat pengguna perpustakaan merupakan fokus utama. Selain itu, perpustakaan BPK diharapkan mampu berperan aktif dalam meningkatkan literasi publik mengenai pemeriksaan BPK serta tanggungjawab keuangan negara.

Pencapaian akreditasi A oleh Perpustakaan BPK RI, tutur Bahtiar juga menempatkannya sebagai salah satu acuan atau rujukan nasional bagi perpustakaan-perpustakaan lain di Indonesia. Rekomendasi dan penilaian dari tim standarisasi dan akreditasi perpustakaan nasional menjadikan perpustakaan BPK RI sebagai contoh dalam penerapan standar nasional perpustakaan.

Sosialisasi Study Buddy

Program Study Buddy adalah program yang diinisiasi oleh Perpustakaan BPK. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional, Yudi Ramdan Budiman mengungkapkan pentingnya program Study Buddy sebagai bukan hanya sekedar teman belajar, tetapi juga sebagai wadah untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Dia mempercayai bahwa peserta program ini, yang sedang menempuh pendidikan kembali, memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu memperkuat kemampuan BPK secara institusi dan individu.

Yudi menyampaikan bahwa belajar tidak boleh pernah berhenti, dan pengalaman yang dibagikan oleh sesama rekan BPK yang telah menyelesaikan pendidikan S2 atau S3 akan memberikan keyakinan, semangat, dan komitmen kepada





Perpustakaan Badan
Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia



▲
Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional,
Yudi Ramdan Budiman

peserta program ini untuk menyelesaikan studi mereka dengan sukses. Dia menekankan bahwa pengalaman adalah guru yang baik, dan dengan adanya program ini, langkah-langkah menuju kesuksesan akan menjadi lebih singkat.

Selanjutnya, Yudi menjelaskan mengapa perpustakaan menjadi inisiator program ini. Menurutnya, perpustakaan BPK ingin menjadi lebih dari sekadar tempat untuk meminjam buku; mereka ingin menjadi pusat riset dan rujukan yang membantu siapa pun yang ingin belajar tentang pengelolaan sektor publik. Hal ini sejalan dengan visi perpustakaan untuk menjadi nilai tambah dalam mempercepat proses pembelajaran dan proses kerja di BPK.

Yudi berharap Study Buddy dapat menjadi langkah awal untuk memperkaya kemampuan dan mengawal kualitas bekerja di BPK. Dia menekankan pentingnya kualitas intelektual dalam menghadapi dinamika keilmuan, pengetahuan, dan teknologi yang cepat berubah. Dengan demikian, program ini bukan hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi juga merupakan bagian dari amal ibadah untuk meningkatkan kualitas diri dan institusi.

Pentingnya pendidikan tinggi

Penelaah Teknis Kebijakan BPK, Windawaty Pangaribuan menyatakan pendidikan menjadi pilar utama dalam membentuk individu dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bagaimana pun, tantangan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (HDI) masih menjadi fokus bagi banyak negara, termasuk Indonesia.

Sebagai salah satu lembaga publik yang memiliki peran penting dalam pembangunan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut memperhatikan hal ini. Namun, bagaimana hubungan antara pendidikan tinggi dengan pembangunan kualitas manusia dan organisasi seperti BPK?



HDI, sebuah tolok ukur penting yang digunakan oleh pemerintah dan organisasi internasional, menandakan perkembangan manusia dalam suatu negara. Semakin tinggi HDI, semakin baik kondisi perkembangan manusianya, dan ini berdampak pada kualitas hidup. Melalui pendidikan tinggi, seperti gelar S2 dan S3, produktivitas individu meningkat, kontribusi pada ekonomi membaik, dan pertumbuhan ekonomi nasional terstimulasi. Pendidikan tinggi juga memainkan peran kunci dalam penelitian dan inovasi, yang berdampak pada peningkatan HDI melalui perkembangan teknologi dan pengetahuan.

Pendidikan tinggi, khususnya gelar S3, berperan penting dalam penelitian dan inovasi. Penelitian dan inovasi ini dapat mempengaruhi perkembangan teknologi dan pengetahuan yang dapat mendukung peningkatan HDI.

Dalam konteks BPK, pendidikan tinggi menjadi krusial dalam meningkatkan kualitas audit dan kontribusi terhadap pembangunan negara. Data pegawai BPK menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan jumlah pegawai yang memiliki pendidikan tinggi, terutama pada tingkat S2 dan S3. Meskipun angka masih relatif kecil dibandingkan dengan kementerian lainnya, fokus pada peningkatan kualitas individu di dalam organisasi adalah langkah penting.

Windawaty memiliki catatan kecil terkait level pendidikan di BPK, total pegawai BPK mencapai 9.880 orang dengan jumlah perempuan 5.969 orang dan pria 3.911 orang. Dari total tersebut yang berpendidikan D3 mencapai 464, D4 atau Strata 1 sebanyak 5.404, Strata 2 sebanyak 2.426 dan S3 sebanyak 48 orang.

Dalam upaya mendorong pendidikan tinggi di BPK, penting untuk membangun sistem dukungan dan kolaborasi. Windawaty menyatakan *platform* program "Study Buddy" dapat menjadi solusi efektif untuk mendukung pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Melalui *platform* ini, pegawai dapat saling mendukung, berkolaborasi dalam pemahaman materi, dan memotivasi satu sama lain.

Kolaborasi antara sesama pegawai juga dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman, serta memperkuat hubungan sosial di dalam organisasi.

"Study Buddy Sebuah *platform* yang didesain untuk mempertemukan partner diskusi dengan karya siswa TB/IB maupun yang akan melanjutkan studi untuk mencari inspirasi dan motivasi dalam proses studi. Partner diskusi ini antara lain pegawai yang sudah terlebih dahulu menyelesaikan TB/IB. Peran buddies antara lain untuk bisa kolaborasi dalam pemahaman materi, memotivasi konsistensi, menjadi sumber referensi dan juga menjadi dukungan sosial dan dukungan emosional,"ucap dia.

"Pentingnya program Study Buddy sebagai bukan hanya sekadar teman belajar, tetapi juga sebagai wadah untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan."

Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional,
Yudi Ramdan Budiman





▲ Penelaah Teknis Kebijakan BPK, Windawaty Pangaribuan



Cara kerjanya study buddy ini, menurut dia, pertama jika sudah ada komitmen, lalu mengisi *form* untuk *database* yang dikirimkan melalui WAG atau email. Lalu nanti akan ada *regular meeting* sesuai permintaan (topik spesifik–*small group discussion*) atau kolaborasi program Study Buddy. Selanjutnya topik yang akan dibahas dapat berasal dari *Buddies* atau perpustakaan riset BPK. Setiap grup akan didampingi paling sedikit dengan 1 *Buddy*.

Dukungan dan kolaborasi antar pegawai melalui program seperti "Study Buddy" menjadi kunci dalam mendorong pencapaian ini. Melalui upaya bersama, BPK dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan negara secara keseluruhan.

Dalam diskusi yang sama, Penelaah Teknis Kebijakan, Lukman Hadi Dwi Purnomo, mengungkap pentingnya melanjutkan sekolah bagi pengembangan individu. Apalagi hal itu sudah tertulis dalam Renstra BPK tahun 2020-2024 yaitu kebijakan peningkatan kompetensi melalui tugas belajar, sertifikasi keahlian, diklat, pengembangan karier, dan sebagainya.

Lalu menurut peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS yaitu PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi. Apalagi SOTK BPK sudah memiliki bagian yaitu Bagian Pengembangan Kompetensi memiliki fungsi merencanakan program dan melaksanakan kebijakan SDM di bidang pengembangan kompetensi. Artinya pengembangan kompetensi itu merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari individu, dari ASN di BPK.

Selanjutnya tujuan pengembangan kompetensi, pertama mengikuti perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan global itu sangat cepat bagi ASN yang menyelenggarakan administrasi penyelenggaraan kewarganegaraan, wajib untuk mengikuti perubahan lingkungan tersebut. Kedua, menurut dia, penyokong pencapaian tujuan institusi.

"Karena institusi juga harus ikut berubah menyesuaikan dengan perubahan lingkungan global. Kemudian yang ketiga adalah mendorong inovasi dan kreativitas. Jadi inovasi-inovasi yang baru akan muncul sehingga kompetensi seseorang akan berkembang. Dan tujuan yang keempat meningkatkan kesejahteraan ASN," ucap dia.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perpustakaan Riset

JAM PELAYANAN
Senin-Jumat

07.30
-
15.30

**TERBUKA
UNTUK UMUM**

Koleksi produk-produk BPK yang tidak dijumpai di perpustakaan lain



Gedung BPK RI lantai 2
Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat

**Desain
Ruangan
Menarik**



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



[BPK RI Official](https://www.youtube.com/BPKRIOfficial)



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpkri](https://www.tiktok.com/@bpkri)



wartapemeriksa.bpk.go.id

Meningkatkan Peran Mal Pelayanan Publik di Kota Jambi



BPK Perwakilan Provinsi Jambi melakukan pemeriksaan kinerja yang bertujuan menilai efektivitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di bawah naungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Jambi.

Untuk diketahui, MPP adalah penggabungan pelayanan publik swasta dan pemerintahan yang diberikan oleh lembaga, kementerian, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD pada satu lokasi dalam upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Ini dilakukan dengan tujuan menyediakan layanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

MPP Kota Jambi ditetapkan melalui Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. MPP ini sekaligus menjadi MPP ke-59 di Indonesia dan yang ke-9 di Sumatera. MPP Kota Jambi secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 19 Juni 2022.

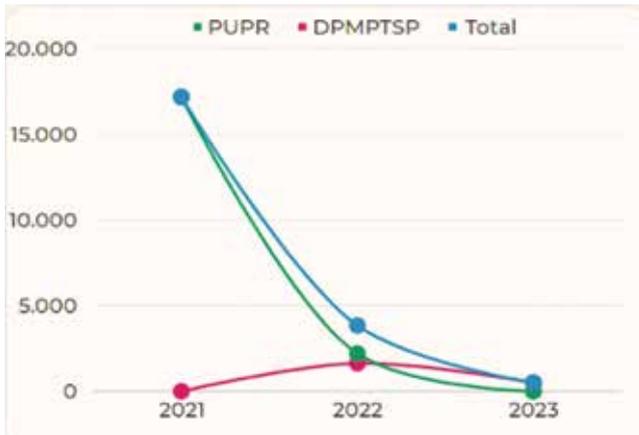
Walaupun baru didirikan, pengunjung dari MPP Kota Jambi per semester I 2023 sudah mencapai 133.312 orang. Hal ini dipicu tingginya minat masyarakat Kota Jambi dalam memanfaatkan pelayanan yang disediakan MPP Kota Jambi.

Pemeriksaan BPK terhadap MPP Kota Jambi menggunakan tiga kriteria utama, yaitu tersedianya kebijakan dan kelembagaan MPP Kota Jambi, terjadinya peningkatan pelayanan publik akibat implementasi dari MPP, dan adanya monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan MPP.



Dari pemeriksaan itu, BPK Perwakilan Provinsi Jambi menemukan, kelembagaan MPP Kota Jambi tidak ada dalam perencanaan. Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Jambi melakukan telaah mendalam terhadap beberapa dokumen terkait dengan kebijakan dan kelembagaan MPP.

Berdasarkan analisa RPJMD Kota Jambi, diketahui bahwa penjabaran misi ke-1 adalah untuk mencapai tujuan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang diukur dari indeks reformasi birokrasi yang mengikat dari tahun ke tahun. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam misi tersebut terdapat hal untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, akan tetapi program prioritas daerah Kota Jambi tidak ada yang terkait dengan program penyelenggaraan pelayanan publik melalui MPP.



Terlebih lagi, hasil reviu terhadap Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan terkait pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan MPP Kota Jambi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2009.

Atas temuan tersebut, BPK menyimpulkan bahwa dokumen perencanaan Pemkot Jambi belum dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan MPP dan tidak selaras dengan RPJMN. Selain itu, penyelenggaraan MPP Kota Jambi juga berpotensi tidak memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat. BPK merekomendasikan agar Walikota Jambi segera menyusun dokumen perencanaan daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penyelenggaraan MPP.

Selain terkait perencanaan, BPK juga menemukan bahwa MPP belum memiliki sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut berupa dukungan keuangan/anggaran, SDM, serta sarana dan prasarana. Khusus dalam penyelenggaraan MPP, Pemkot Jambi membutuhkan dukungan sumber daya yang cukup untuk mendukung pencapaian tujuan pelayanan publik yang terintegrasi.

Anggaran MPP Kota Jambi bersumber dari dua OPD, yaitu Dinas PU dan DPMPTSP. Dinas PU mengalokasikan dana sebesar Rp17,168 miliar dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana MPP pada tahun 2021. Pada tahun 2022, Dinas PU kembali mengalokasikan untuk peningkatan sarana dan prasarana sebesar Rp2,2 miliar dan Rp1,639 miliar oleh DPMPTSP untuk operasional. Pada semester I 2023, Dinas PU tidak lagi mengalokasikan sehingga sumber anggaran MPP Kota Jambi hanya berasal dari DPMPTSP sebesar Rp504 juta.

Setelah dilakukan *inquiry* dengan pihak pengelola MPP Kota Jambi, diketahui bahwa penganggaran tersebut dilakukan secara spontanitas tanpa menggunakan analisis kebutuhan biaya. Hal ini menyebabkan MPP Kota Jambi masih mengalami defisit anggaran untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kendala belum dilakukan analisis tersebut karena dalam pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi (monev) tidak hanya dilakukan oleh DPMPTSP namun melibatkan OPD lain yang telah ditetapkan sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi MPP.

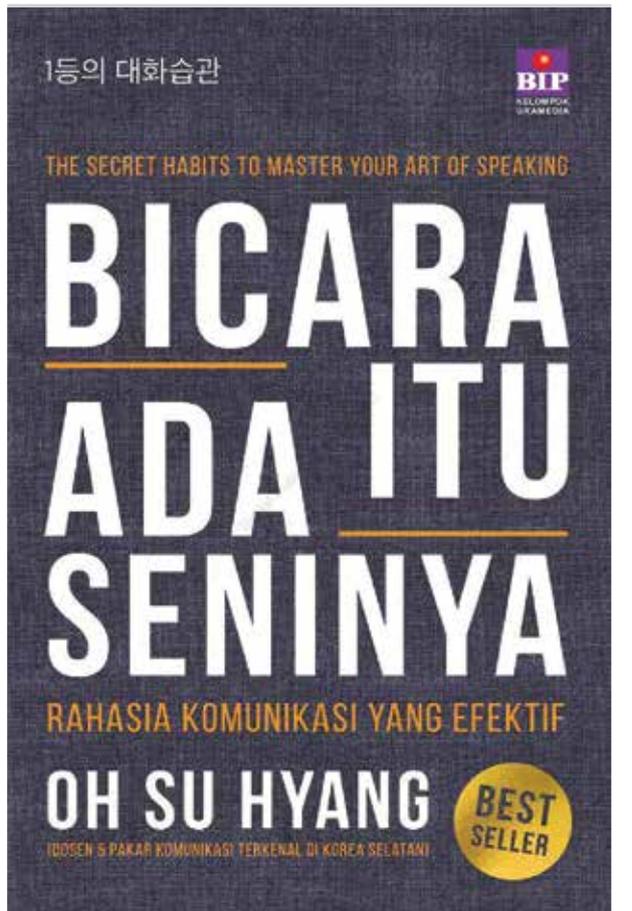




Laboratorium Forensik Digital BPK berhasil mendapatkan sertifikasi akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional atas kompetensinya sebagai laboratorium pengujian dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) sebagai persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi



Rahasia Komunikasi yang Efektif



Komunikasi adalah hal esensial dalam hidup yang mesti diperhatikan dengan baik. Hanya saja, ternyata komunikasi yang baik dan efektif ada seninya.

Hal itu terungkap dalam buku berjudul 'Bicara Itu Ada Seninya, Rahasia Komunikasi yang Efektif' karya Oh Su Hyang.

Buku ini pada dasarnya mengungkap beberapa pertanyaan penting dalam komunikasi, seperti kemahiran berbicara adalah bawaan lahir yang tidak akan bisa diperbaiki, kenapa kita takut bicara, hingga bagaimana kita dapat menjadi orang yang menyenangkan dengan ucapan yang kita sampaikan.

Buku ini juga bisa menjadi jawaban bagi yang memiliki masalah dalam berbicara serta membutuhkan semacam terapi untuk memperbaiki kekurangan dalam berbicara. Lebih lanjut, buku ini juga memberikan pemahaman bahwa kehidupan kita dapat berubah dengan mengubah cara kita berbicara.

"Buku ini pada dasarnya mengungkap beberapa pertanyaan penting dalam komunikasi, seperti kemahiran berbicara adalah bawaan lahir yang tidak akan bisa diperbaiki, kenapa kita takut bicara, hingga bagaimana kita dapat menjadi orang yang menyenangkan dengan ucapan yang kita sampaikan."

Dari segi tema, buku ini mengambil tema yang sudah umum, yaitu komunikasi, khususnya dalam dunia kerja. Namun, menjadi unik karena penulis menyertakan cerita menarik dari orang-orang terkenal, seperti pembawa acara, artis, tenaga pemasaran, hingga Presiden, yang kemudian diikuti dengan penjelasan singkat atas teknik komunikasi yang mereka gunakan.

Melalui cerita-cerita tersebut, penulis memberikan pelajaran kepada kita bahwa semua hal membutuhkan usaha, dengan kuncinya adalah berlatih. Walaupun buku ini adalah terjemahan dari karya aslinya yang berjudul *the Secret Habits to Master Your Art of Speaking*, namun terjemahan isi buku tersebut menggunakan kalimat lugas yang dapat dimengerti semua kalangan.

Meskipun didesain minimalis, buku ini cukup tebal yang terdiri atas 5 bab, di mana setiap babnya mengandung 7-10 bagian. Bab I berjudul "Perbedaan Juara 1 dan Juara 2 Terletak pada Ucapannya" menyajikan antara lain tentang kesan pertama yang diperoleh saat seseorang berbicara, penyebab takut berbicara dan bagaimana mengubah cara bicara akan mengubah hidup.

Bab II "Pintar Mendengar, Pandai Berbicara" menyajikan antara lain teknik membujuk paling ampuh, teknik negosiasi dan teknik perdebatan. Selanjutnya, jika kita membutuhkan tips bagaimana ucapan kita membuat lawan bicara memihak kita, informasi tersebut dapat ditemukan dalam Bab III.

Bab IV berjudul "Beratnya Ucapan Ditentukan oleh Dalamnya Isi" mengajak kita antara lain untuk lebih memahami dasar-dasar percakapan dan berhasil dalam komunikasi kita. Terakhir, bab V yang berjudul "Suara Bagus Bukan Bawaan dari Lahir" menyajikan banyak contoh tokoh-tokoh Korea yang memiliki suara dan teknik komunikasi yang menarik dan menawan.

Secara garis besar, buku ini mengulas segala hal tentang berkomunikasi dalam berbagai profesi, unsur nonverbal dalam berbicara, penyebab kesulitan dalam hal komunikasi, rahasia untuk lancar berkomunikasi, teknik persuasi dan negosiasi serta masih banyak lagi. Selain itu, buku ini juga mengajarkan teknik vokal supaya suara tidak sumbang.

Dalam isi bukunya tersebut, penulis juga menjelaskan sebuah rumus terapi komunikasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu $C = Q \times P \times R$, di mana C adalah *Communication* dengan tiga hal yang diperlukan untuk memenuhinya, yaitu Q atau *Questions*, P atau *Praise* dan R atau *Reactions*.

Hal menarik lainnya dari buku ini adalah adanya kalimat-kalimat apik yang bermunculan di setiap lembarnya yang memberikan poin pembelajaran bagi pembacanya. Salah satu kutipan yang menggarisbawahi pentingnya memiliki keterampilan komunikasi yang baik dalam buku ini adalah "Hidup akan berubah jika pemikiran berubah. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa perilaku penting dalam kehidupan. Hidup akan berubah jika perilaku berubah. Keduanya benar. Jangan abaikan bahwa ucapan pun memiliki porsi yang sama pentingnya dengan pikiran dan perilaku."

Selain itu, satu hal terpenting yang acap kali diabaikan pada saat berkomunikasi juga disajikan oleh pengarang dalam buku ini. "Teknik terpenting dalam berbicara adalah mendengarkan. Sikap mendengarkan keluhan dan kegelisahan lawan bicara akan mendekatkan pembicara dan pendengar dalam waktu singkat."

"Hidup akan berubah jika pemikiran berubah. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa perilaku penting dalam kehidupan. Hidup akan berubah jika perilaku berubah. Keduanya benar. Jangan abaikan bahwa ucapan pun memiliki porsi yang sama pentingnya dengan pikiran dan perilaku."

Buku ini juga menyisakan celah untuk dikritisi. Walaupun kisah menarik dari orang-orang terkenal disajikan untuk menginspirasi, penggunaannya dirasakan terlalu banyak, namun metode-metode komunikasi yang digunakan oleh orang-orang tersebut justru kurang dirincikan dan tidak dijelaskan secara mendalam.

Selain itu, karena pengarangnya berasal dari negara Korea, contoh yang digunakan dalam buku ini kebanyakan adalah tokoh-tokoh Korea yang tidak semuanya dikenal oleh kita di sini.

Lebih lanjut, isi buku ini lebih berfokus pada ilmu komunikasi untuk *marketing*, di mana hal tersebut baru diketahui setelah membaca isinya karena tidak diinformasikan di halaman depan atau di ringkasan isi buku yang disajikan di halaman belakang. Pengarang juga tidak menyajikan penutup yang dapat menyimpulkan keseluruhan poin-poin yang didiskusikan dalam buku tersebut.

Secara keseluruhan, buku ini ringan untuk dibaca dan dipahami. Cocok untuk kita semuanya yang ingin meningkatkan kemampuan kita berkomunikasi untuk menjadi lebih baik, membuat lawan bicara kita nyaman dan tujuan komunikasi kita tercapai.



Museum BPK RI

Menghadirkan koleksi sejarah seputar BPK

**TERBUKA
UNTUK
UMUM
GRATIS!**



Alamat:

Jl. Diponegoro
No. 1, Magelang

Buka:

Selasa - Minggu

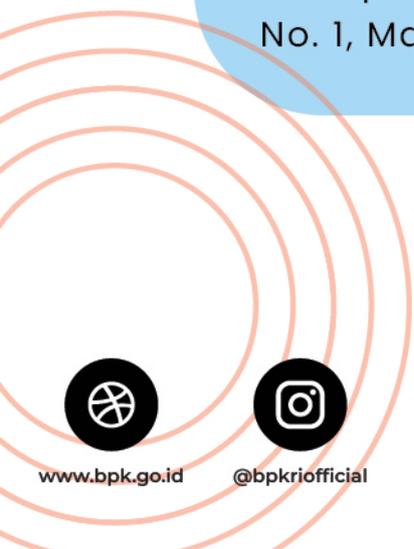
09:00-15:00

(0293) 310230

museum.bpk.go.id

[museum_bpkri](https://www.instagram.com/museum_bpkri)

Wisata edukasi di berbagai ruangan menarik



Memperkuat Tata Kelola BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menekankan, tata kelola atau *governance* adalah hal krusial dalam menjaga kinerja positif perusahaan pelat merah. Dengan tata kelola yang baik, Erick meyakini BUMN dapat mencetak kinerja yang optimal sekaligus mengembangkan kemampuan hingga menembus pasar internasional. Oleh karena itu, menurut Erick, pemeriksaan yang dilakukan BPK akan memperkuat kepercayaan terhadap BUMN dalam menjalankan berbagai aksi korporasi maupun penugasan dari pemerintah.

"Kita percaya kalau *governance* terjaga, maka tidak hanya kita dipercaya di Indonesia tapi juga menjaga *performance* kita sebagai pengembangan pasar di luar negeri," kata Erick dalam *Entry Meeting* Pemeriksaan pada Kementerian BUMN dan BUMN.

Erick menyampaikan, tata kelola adalah hal yang telah menjadi fokus perhatiannya sejak awal menjabat sebagai menteri. Menurutnya, hal ini dapat mendukung adanya *check and balance* guna menjaga kepercayaan masyarakat. Dia mengatakan, hal itu turut mendukung pencapaian kinerja BUMN sampai saat ini.

Dalam periode pemerintahan ini, BUMN mendapatkan penugasan untuk menyelesaikan 88 proyek pemerintah. Erick mengatakan, dari 88 proyek tersebut, sebanyak 79 proyek sudah berhasil terselesaikan. Kemudian, untuk sembilan proyek tersisa akan diselesaikan pada tahun ini.

Erick memaparkan, terdapat capaian positif dari sisi kinerja keuangan yang berhasil ditorehkan oleh BUMN. Dia mengatakan, laba bersih BUMN berhasil mengalami kenaikan signifikan.

◀ Menteri BUMN, Erick Thohir

"Kita percaya kalau *governance* terjaga, maka tidak hanya kita dipercaya di Indonesia tapi juga menjaga *performance* kita sebagai pengembangan pasar di luar negeri."

"Di awal, kami mencatat laba itu sekitar Rp 13 triliun. Tetapi, kemarin itu pada kuartal III 2022 sudah mencapai Rp210 triliun dan pada kuartal III 2023 masih ada kenaikan menjadi Rp231 triliun," ujarnya.

Erick juga menargetkan akan ada kenaikan pemberian dividen oleh BUMN dari Rp81 triliun menjadi Rp85 triliun pada tahun ini. Dia berharap hal itu semakin dapat menegaskan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara.

"Tidak hanya berupa pajak saja tapi kita bisa memberikan sumbangsih terhadap program-program pemerintah yang bisa dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan kesejahteraan pada rakyat," ungkapnya.

Erick menyampaikan, capaian positif itu berhasil diraih dengan adanya perbaikan tata kelola yang terus menerus dilakukan. Erick pun mengamini pernyataan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII/Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo bahwa dengan pengelolaan yang baik dan transparan maka BUMN dapat menggapai berbagai peluang yang tersedia.

Dia mencontohkan, BUMN telah meraih kepercayaan dari Asian Development Bank (ADB) dalam proyek pembangunan infrastruktur di Filipina. Dua BUMN Indonesia berhasil mendapatkan dua paket proyek infrastruktur senilai Rp 8,5 triliun.

"Artinya, memang bisa kalau mau. Dengan adanya *governance* maka timbul kepercayaan dan akhirnya kita bisa membuka *market* yang lebih besar," ujarnya.

Erick mengingatkan, saat ini Indonesia perlu terus menjaga perekonomian mengingat ada tantangan geopolitik yang semakin memunculkan ketidakpastian. Dengan berbagai ketegangan itu, kemudian bisa menimbulkan efek terhadap ekonomi Indonesia lantaran rantai pasok yang terganggu.

Erick pun menyoroti pentingnya kejelasan tolok ukur penugasan yang diberikan kepada BUMN. Dia menegaskan, jangan sampai penugasan tersebut mengakibatkan ketidaksehatan di BUMN itu sendiri.

Sinergi BUMN dan BPK, ujar Erick, dapat mendukung upaya memperjelas tolok ukur tersebut. Hal ini lantaran penugasan terhadap BUMN kerap berkaitan dengan berbagai kementerian lain.

Erick pun mengapresiasi adanya *entry meeting* pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK karena dapat mendorong keterbukaan. Dia berharap, pemeriksaan dapat memperbaiki kinerja BUMN dan mencari solusi untuk diterapkan di kemudian hari.

"Tentu dari kami di BUMN sangat terbuka untuk melakukan perbaikan," tegas Erick.

Permintaan Informasi & Pengaduan Masyarakat Lebih Mudah Pakai PPID BPK Mobile

**Segera Unduh di Playstore
BPKawan!!**



Self-Love

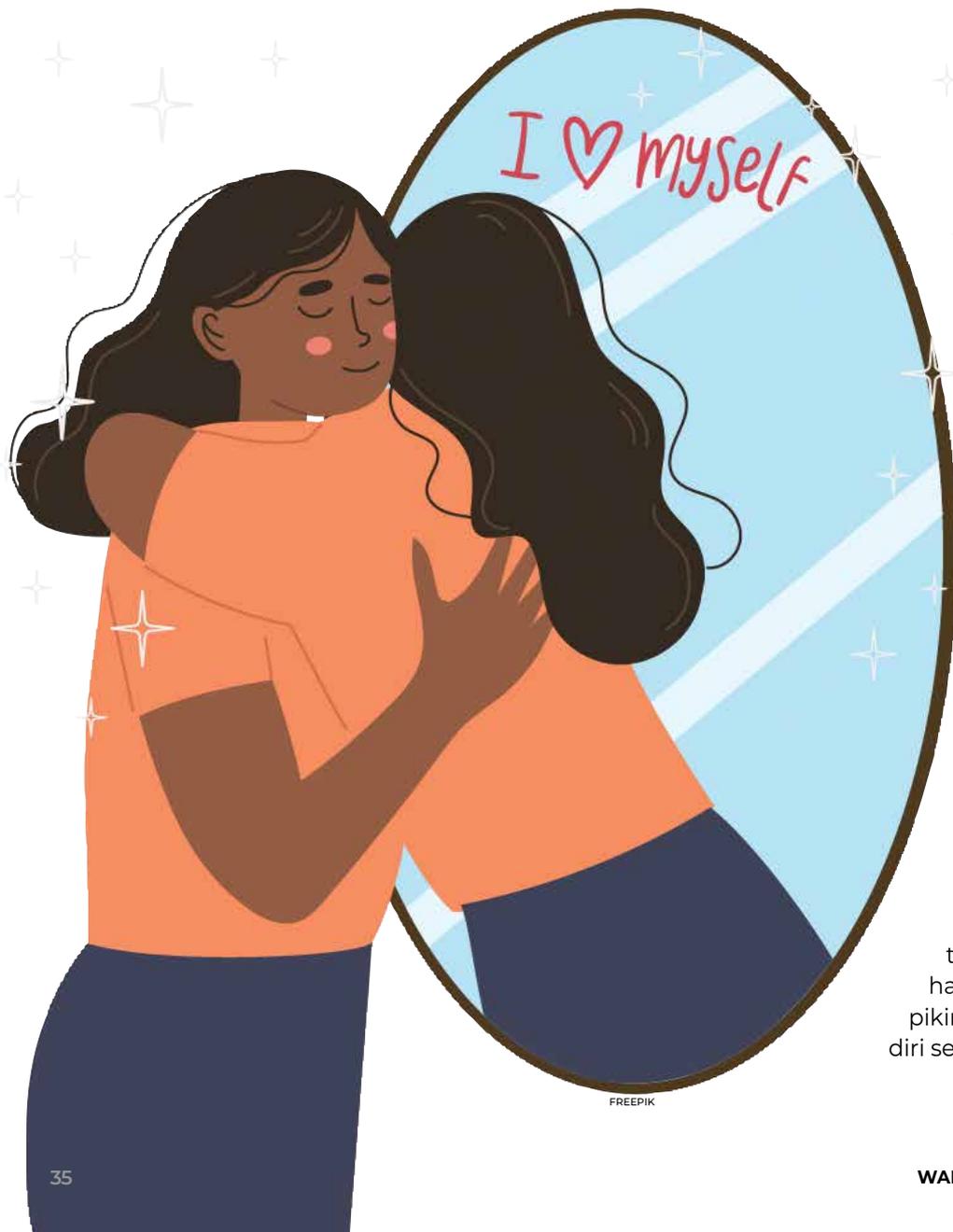
Pentingnya Mencintai Diri Sendiri

Kita sebagai individu mungkin sering terperangkap dalam berbagai pernyataan yang ternyata membuat diri kita tidak bisa maju. Malah, pernyataan itu juga seakan-akan mendorong kita tidak pernah layak mendapat kebahagiaan.

Kalimat seperti, "Aku bodoh, makanya aku selalu gagal dalam melakukan sesuatu. Aku tidak berhak untuk bahagia". Atau kalimat lainnya, "Aku tidak mungkin berhasil, sekali pun berhasil mungkin hanya faktor keberuntungan saja."

Kemudian, yang menjadi pertanyaan, apa boleh kita terus terperangkap dalam pemikiran seperti itu? Jawabannya tentu tidak boleh, karena pemikiran tersebut sama saja kita tidak mengedepankan *self-love*. Yuk, mari sama-sama cari tahu tentang pentingnya *self-love*!

Self-love berarti menerima diri sendiri sepenuhnya, memperlakukan diri sendiri dengan penuh kelembutan dan rasa hormat, serta memprioritaskan kesehatan fisik dan emosional. *Self-love* bukanlah sesuatu yang hanya ditunjukkan melalui tindakan saja, melainkan juga harus terinternalisasi dalam pikiran dan perasaan kita tentang diri sendiri menjadi lebih positif.



FREEPIK

Kenapa sih harus *self-love*?

Self-love penting dimiliki karena menjadi sebuah fondasi yang dapat membangun sikap yang bijak dan tegas, menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain, mengejar minat dan mimpi, serta merasa bangga terhadap diri sendiri.

Self Love pun memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Stres rendah, ketahanan tinggi

Tantangan dapat membuat kita merasa tidak mampu dan stres. *Self-love* dapat membantu kita menghargai diri sendiri dengan optimis bahwa kita dapat menghadapi dan menganggap tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang.

2. Efikasi diri tinggi

Ketika kita *self-love*, kita lebih percaya diri akan kemampuan kita untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini dapat mendorong kita untuk mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru, bahkan jika itu berarti keluar dari zona nyaman.

3. Rasa empati

Self-love adalah dasar dari cinta kepada orang lain. Dengan mencintai diri sendiri, kita akan lebih mampu menerima orang lain apa adanya dan berempati dengan perjuangan mereka.

Nah bagi anda yang ingin menerapkan *self-love*, ternyata ada beberapa hal yang penting anda ketahui. Pertama, kenali diri sendiri. Kalian dapat meluangkan waktu untuk mempelajari diri sendiri dan melakukan aktivitas yang disukai, seperti membuat jurnal, menjelajah hobi baru, dan bertemu dengan teman/kekasih. Dengan cara ini, kalian dapat menyelaraskan hidup dengan apa yang benar-benar memberi kalian kebahagiaan dan kepuasan.

Kedua, rayakan setiap pencapaian. Akui dan rayakan pencapaian kalian, tanpa memandang seberapa besar atau kecilnya. Misalnya, berikan hadiah kepada diri sendiri dengan hal yang kalian sukai, refleksikan perkembangan kalian, dan bagikan keberhasilan kalian pada orang-orang terkasih.

Ketiga, bangun rutinitas untuk perawatan diri. Sisihkan waktu untuk merawat diri dengan melakukan aktivitas yang membawa kebahagiaan dan relaksasi. Aktivitas seperti olahraga, meditasi, atau sekadar menikmati hobi dapat menyehatkan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional kalian.

Keempat, mengasihani diri sendiri/*self-compassion*. Perlakukan diri kalian dengan penuh kebaikan dan pengertian, terutama saat menghadapi masa-masa sulit dalam hidup. Ingatlah bahwa kalian merupakan manusia yang pantas dicintai dan dimaafkan, terlepas dari rasa sakit, kegagalan, dan kekurangan yang kalian miliki. Dengan begitu, berhentilah untuk menyalahkan diri sendiri sepenuhnya.

Kelima, berbicaralah pada diri sendiri dengan positif. Cara kalian berbicara pada diri sendiri menentukan persepsi diri dan kesejahteraan kalian. Hindari pembicaraan negatif, dan ganti dengan afirmasi dan pengingat tentang kekuatan, kemampuan, dan nilai yang ada pada diri kalian.

Keenam, menerima diri sendiri. Terimalah kekurangan, keunikan, dan ketidaksempurnaan pada diri kalian. Pahami bahwa kalian unik dan nilai kalian tidak ditentukan oleh standar eksternal atau perbandingan dengan orang lain.

Ketujuh, menetapkan batasan. Kalian dapat mengenali dan menjelaskan apa yang kalian butuhkan kepada orang lain dengan tegas. Utamakan kesejahteraan kalian dengan mengatakan "tidak" pada hal-hal yang bisa menghabiskan energi atau merugikan nilai-nilai kalian.

Kedelapan, mencari dukungan. Pahami kapan kalian membutuhkan bantuan dan perlu menghubungi teman, keluarga, atau profesional yang dapat diandalkan. Mencari dukungan adalah bentuk dari *self-love* untuk mendapatkan perhatian dengan panduan yang jelas dan pantas kalian terima.

Optimalisasi Posisi BIDICS dalam Struktur Organisasi

BPK telah membentuk unit Big Data Analytics (BIDICS) untuk mendukung tercapainya Rencana Strategis 2020-2024. Namun, masih terdapat hambatan teknis sehingga BIDICS belum optimal mengemban amanah tersebut.

Hal tersebut menurut Pemeriksa di Auditorat Utama Investigasi BPK, Dwi Amalia Sari dan Yenni Elvariza, karena struktur organisasi BIDICS yang hanya bersifat *ad hoc* saja. Agar memberikan manfaat semakin luas, BIDICS perlu ditempatkan dalam struktur organisasi yang sesuai.

Hal ini bertujuan memberikan alternatif struktur organisasi yang lebih optimal untuk BIDICS. Mereka menggunakan *fit for purpose governance frameworks*, untuk menguji efektivitas struktur organisasi melalui konstelasi kerapatan (*density*), keamatan (*cohesion*), dan keutamaan (*centrality*). *Tool* analisa yang digunakan adalah Gephi 0.9, dengan menggunakan empat skenario.

Hasil analisa menunjukkan bahwa BIDICS sebaiknya menjadi satuan kerja Eselon 1 yang berdiri sendiri di bawah kendali bersama Ketua dan Wakil Ketua BPK. "Analisa ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pengambil keputusan agar keberadaan BIDICS semakin memberikan manfaat bagi BPK," ungkap mereka dalam *paper*-nya.

Mereka menjelaskan, bahwa salah satu sasaran Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 adalah “Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif” dengan Pengembangan dan Pemanfaatan Big Data Analytics. Alasannya jelas, di era digital, data dan informasi berlimpah. Hal ini mendorong BPK membentuk BIDICS, sebuah Lembaga *ad hoc* di bawah Biro TI, agar mampu menjadi pusat pengelolaan data dan informasi melalui Big Data Analytics.

Tujuannya agar meningkatkan kualitas pemeriksaan sehingga lebih strategis, antisipatif, dan responsif; mengoptimalkan pengelolaan informasi, dan mendorong proses transformasi digital (Sekretaris Jenderal BPK RI, 2021).

Berdasarkan SK Sekjen BPK Nomor 206/K/X-XIII.2/8/2021, pengguna BIDICS dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Pertama, Tingkat Pimpinan yang terdiri atas Pimpinan BPK (Badan), Pimpinan Tinggi Madya, dan Pimpinan Tinggi Pratama. Kemudian, Tingkat Pelaksana terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa, dan Pelaksana BPK (penunjang dan kesekretariatan).

Sayangnya, saat ini penggunaan dan pemanfaatan BIDICS di BPK masih terbatas. Salah satu hambatannya adalah karena BIDICS sebagai lembaga *ad hoc* tidak memiliki wewenang memberikan data milik satker lain, sehingga yang membutuhkan data harus berkordinasi sendiri terlebih dahulu ke pemilik data.

Padahal BIDICS memiliki posisi optimal dan memberikan alternatif struktur organisasi agar



para pengambil keputusan di BPK dapat memutuskan yang terbaik untuk kepentingan institusi, negara dan bangsa secara efektif.

Hasil Analisa menunjukkan bahwa BIDICS akan dapat bekerja dengan lebih maksimal jika ditempatkan menjadi satuan kerja Eselon 1 yang mandiri berdiri sendiri di bawah pengendalian bersama antara Ketua dan Wakil Ketua BPK.

"Analisis ini memiliki manfaat langsung bagi organisasi untuk membuat BIDICS berfungsi secara lebih optimal; dan untuk BPK agar sejajar dengan negara-negara lain yang telah lebih dulu menggunakan dan memanfaatkan BIDICS untuk kepentingan yang lebih luas," tutur mereka dalam *paper*-nya.

Untuk menjelaskan posisi yang paling optimal untuk BIDICS, Dwi Amalia dan Yenni Elvariza, menganalisis atas struktur tata Kelola BIDICS Dilakukan melalui dua tahap. Perumusan Alternatif menggunakan *fit for purpose governance structure framework* (Rijke 2012, Folke,2005) dimana struktur paling sesuai



"Analisis ini memiliki manfaat langsung bagi organisasi untuk membuat BIDICS berfungsi secara lebih optimal; dan untuk BPK agar sejajar dengan negara-negara lain yang telah lebih dulu menggunakan dan memanfaatkan BIDICS untuk kepentingan yang lebih luas."

adalah yang paling optimal mendukung Renstra BPK.

Sehingga, analisa dilakukan berdasarkan proyeksi tugas dan fungsi BIDICS ke depan, wewenang yang dibutuhkan untuk menjalankan proyeksi tersebut, dan peraturan BPK terkait tugas dan fungsi satker lain dalam struktur sekarang. Dengan kriteria ini, keduanya merumuskan empat skenario posisi BIDICS di struktur yang sekarang.

Hasilnya, Sesuai Renstra, BIDICS diproyeksikan mendukung penggunaan *big data analytics* dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja; mendukung BPK berperan aktif dalam INTOSAI WGITA (Working Group on IT Audit) dan WGBD (Working Group on Big Data); memotori pembentukan PUSAKA (Pusat Akuntabilitas Keuangan) Negara; dan mendukung analitikal data untuk kebijakan *oversight, insight*, serta *foresight* BPK.

Oleh sebab itu, BIDICS tidak dapat ditempatkan di bawah Biro TI. Tanggung jawab tersebut memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya. Sehingga BIDICS harus berwenang mengambil keputusan sendiri (*Those Charged With Governance*).

BIDICS juga harus memiliki fungsi analitikal data. Dwi dan Yenni menawarkan empat alternatif.

Sebagai Eselon 2, BIDICS dapat ditempatkan di bawah Direktorat Perencanaan, Evaluasi Pengembangan dan Kebijakan PKN (Renvaja (dhi. Revbang)); dan Auditorat Utama Investigasi (AUI).

Sebagai Eselon 1, BIDICS sebaiknya ditempatkan di bawah Ketua dan atau Wakil Ketua BPK dan dipisah menjadi dua: Pusat Data Management yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengelola *database*, serta Pusat Data Analytics, yang berfungsi untuk melakukan semua analitikal dan pemodelan data, serta menyajikannya sebagai informasi yang mudah dipahami.

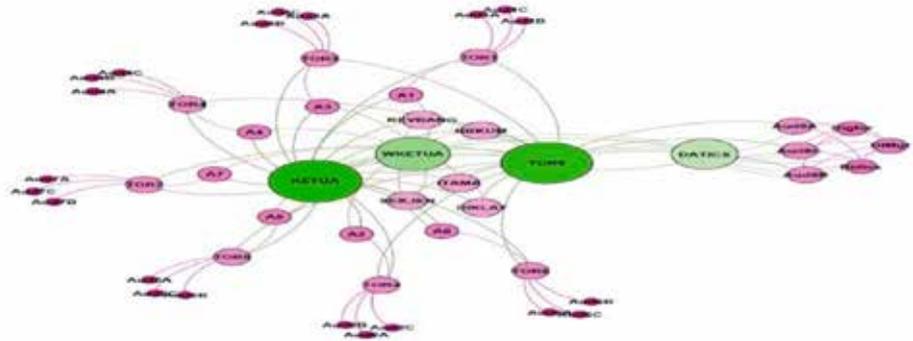
Dengan demikian, empat alternatif penempatan BIDICS dalam struktur organisasi BPK adalah pertama sebagai Eselon 2 di bawah Renvaja (dhi. Revbang). Kedua, sebagai Eselon 2 di bawah AUI. Ketiga, sebagai Eselon 1 dimana Pusat Data Manajemen berada di bawah Wakil Ketua dan Pusat Data Analytics di bawah Ketua. Keempat, sebagai Eselon 1 yang bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua BPK secara bersama-sama.

Berdasarkan perumusan alternatif di atas, keduanya melakukan Analisa kerapatan (*density*), keeratan (*cohesion*) dan keutamaan (*centrality*) atas *actor network diagram* yang dihasilkan dari Gephi 0.9. kerapatan (*density*) dilihat dari sebaran para actor dalam satu struktur tata kelola. Sebaran yang terlalu lebar membuat rentang kendali menjadi lemah sehingga membuka peluang terjadinya *system override*.

Sebaran yang terlalu rapat membuat kendali pimpinan sangat kuat, sehingga struktur organisasi tidak fleksibel untuk mengantisipasi VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Keeratan (*cohesion*) dilihat dari jarak antar *actor*. Terlalu erat ke satu kelompok menjadikan organisasi silo, terlalu longgar melemahkan fokus pencapaian tujuan masing masing satker. Keutamaan (*centrality*) dilihat dari besar kecilnya *node* (masing-masing lingkaran yang menggambarkan satu *actor* tertentu).

Jika semakin besar, maka pengaruh *de facto* seorang *actor* terhadap *actor* lain semakin kuat, dan sebaliknya.

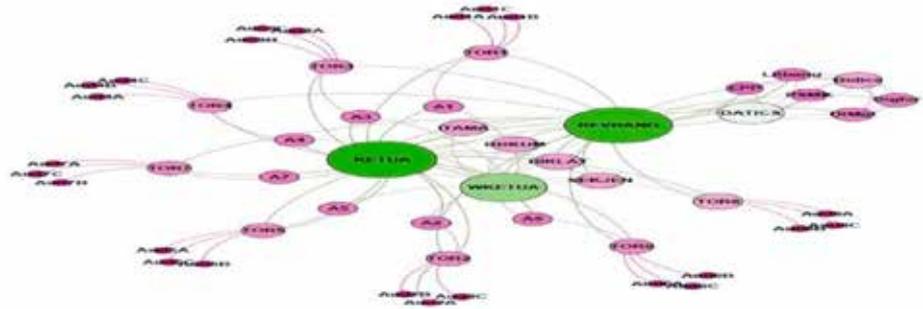
A). BIDICS sebagai Eselon 2 di bawah AUI.



Dari kerapatan, sebaran melebar, BIDICS jauh dari aktor lain dan kendali terdekat hanya dari Tortama AUI. Hal serupa juga terlihat dari analisa keeratan, dimana BIDICS hanya memiliki relasi erat dengan satker-satker AUI selain Tortama.

Alternatif ini juga membuat Tortama AUI memiliki wewenang *de facto* yang sangat besar, bahkan melebihi Wakil Ketua. Dengan posisi seperti ini, BIDICS tidak dapat mendukung fungsi *oversight, insight* dan *foresight* sebagaimana renstra BPK.

B). BIDICS sebagai eselon 2 di bawah Renvaja (dhi. Revbang)



Dari analisa kerapatan, BIDICS masih teralienasi sebagaimana pada alternatif a, akan tetapi rentang kendalinya tidak terlalu lebar. Dari analisa keeratan, BIDICS lebih memiliki relasi baik dengan satker-satker di bawah Renvaja (dhi. Revbang) selain Dir Rev Bang Jak PKN.

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah keutamaan. Di bawah Renvaja, BIDICS tidak memiliki pengaruh yang cukup besar tetapi Dir Rev Bang Jak PKN memiliki pengaruh *de facto* yang bahkan hampir melebihi Ketua BPK. Jika BIDICS ditempatkan di bawah Renvaja (dhi. Revbang), BPK sulit melakukan fungsi *oversight* dan *insight*.

Ketua BPK Ingatkan BI, OJK, dan LPS Terus Perkuat Tata Kelola



Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menekankan pentingnya peran Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjaga perekonomian. Oleh karena itu, ketiga lembaga tersebut juga perlu terus memperkuat tata kelola dalam pengelolaan keuangan negara.

Hal tersebut disampaikan Ketua BPK dalam kegiatan *entry meeting* pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) BI, OJK, dan LPS tahun 2023, di kantor pusat BPK, pada awal Februari.

Ketua BPK menjelaskan bahwa industri jasa keuangan yang kuat dalam mendukung pendalaman keuangan, inklusi keuangan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan adalah elemen krusial dalam membangun perekonomian Indonesia yang tangguh, mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan.

"Untuk itu, penguatan peran dan sinergi BI, OJK, dan LPS yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), termasuk sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), diharapkan dapat mengantisipasi meningkatnya ketidakpastian ekonomi global," jelas Ketua BPK.



▲
Ketua BPK, Isma Yatun

►
Entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) BI, OJK, dan LPS tahun 2023, dihadiri Ketua BPK Isma Yatun, Wakil Ketua BPK Hendra Susanto, Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing, Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Ahmadi Noor Supit, Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisiner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, serta para pimpinan, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK, BI, OJK, dan LPS.



"Untuk itu, penguatan peran dan sinergi BI, OJK, dan LPS yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), termasuk sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), diharapkan dapat mengantisipasi meningkatnya ketidakpastian ekonomi global."

Ketua BPK, Isma Yatun

Ketua BPK sangat mengapresiasi seluruh jajaran Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan karena telah menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan (LK) tahun 2023 *unaudited* kepada BPK tepat waktu.

"Ketepatan waktu penyampaian LK *unaudited* tersebut merefleksikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang semakin baik sekaligus memenuhi nilai relevansi serta akuntabilitas keuangan kepada seluruh pemangku kepentingan," ujar Ketua BPK.

Pada kesempatan tersebut, Ketua BPK berharap agar pemeriksaan yang dilakukan dapat memberikan keyakinan kepada publik bahwa BI, OJK, dan LPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, serta memastikan pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, rekomendasi BPK yang diberikan kepada BI, OJK, dan LPS merupakan alat utama dalam

melakukan perbaikan yang akhirnya dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

"Untuk itu dengan menindaklanjuti rekomendasi tersebut, diharapkan kinerja entitas pemeriksaan BPK dapat meningkat dan keuangan negara dapat dikelola dengan lebih baik sehingga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat," tutupnya.

Kegiatan *entry meeting* ini turut dihadiri Wakil Ketua BPK Hendra Susanto, Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing, Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Ahmadi Noor Supit, Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisiner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, serta para pimpinan, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK, BI, OJK, dan LPS.

Serahkan Dua LHP PKN ke Jaksa Agung, BPK Ungkap Kerugian Negara Sebesar Rp101,84 Miliar



Penyerahan LHP PKN dilakukan Wakil Ketua BPK Hendra Susanto kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) kepada Kejaksaan Agung di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (1/2/2024). Hasil pemeriksaan BPK atas dua PKN yang diminta Kejaksaan Agung tersebut, ditemukan adanya kerugian negara dengan nilai total sebesar Rp 101,84 miliar.

Penyerahan LHP ini dilakukan Wakil Ketua BPK Hendra Susanto kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin. LHP pertama adalah Laporan Hasil Pemeriksaan investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2013 sampai dengan 2019.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp81.350.012.792,00.



Kedua, BPK menyerahkan LHP Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Bantuan Dana Pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia Tahun 2017.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dana hibah di Kemenpora yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp20.491.170.945,00.

“Besarnya harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus,” kata Hendra Susanto.

Kegiatan penyerahan LHP ini juga dihadiri, antara lain, oleh Tortama Investigasi BPK dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Seperti diketahui, dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), disebutkan bahwa BPK melaksanakan PKN untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.

“Besarnya harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus.”

**Wakil Ketua BPK,
Hendra Susanto**

Berikan Kuliah Umum, Anggota I Tekankan Pentingnya Kepemimpinan dan Tata Kelola Keuangan Negara

► Anggota I BPK/
Pimpinan
Pemeriksaan
Keuangan Negara
I Nyoman Adhi
Suryadnyana
melaksanakan
kegiatan
entry meeting
pemeriksaan laporan
keuangan pada
satuan kerja daerah/
wilayah Provinsi
Jawa Timur sebagai
objek pemeriksaan
Auditorat Utama
Keuangan Negara
(AKN) I BPK.



Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan sejumlah pesan kepada taruna dan taruni Akademi Angkatan Laut (AAL). Anggota I berpesan agar taruna AAL senantiasa meningkatkan potensi diri khususnya dalam kepemimpinan serta memahami tata kelola keuangan negara.

Hal ini disampaikan Anggota I BPK saat memberikan kuliah umum bertajuk "Membangun Organisasi yang Transparan dan Akuntabel dalam rangka Mewujudkan AL yang Disegani di Kawasan" di AAL Bumimoro, di Surabaya, Senin (19/2).

"Untuk menjadi pemimpin bangsa, ada proses yang harus dilakukan, salah satunya adalah pembentukan karakter. Saya yakin di Akademi Angkatan Laut, pada taruna dan taruni akan terbentuk karakter jiwa yang disiplin, memiliki inovasi, dan berintegritas," kata Anggota I BPK.

Visi Indonesia Emas 2045 adalah sebuah gagasan ideal bagi Indonesia untuk menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur pada usia yang ke-100 pada tahun 2045. Menurut Anggota I BPK, perwujudan gagasan ideal dalam visi tersebut, tidak dapat dipisahkan dari dukungan sumber daya yang dimiliki dalam tata kelola keuangan negara.

Oleh karena itu, TNI AL sebagai lembaga pengelola keuangan negara, dan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara, memiliki peran penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk mencapai cita-cita besar di 2045 tersebut.

"Sebagai calon pemimpin-pemimpin di masa depan, taruna AAL harus memiliki pemahaman terkait dengan bagaimana mengelola keuangan negara dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat membawa manfaat yang terbesar untuk rakyat," jelasnya dalam kegiatan yang dihadiri Inspektur Jenderal AL Laksamana Muda TNI Rubiyanto dan Gubernur AAL Mayor Jenderal (Marinir) Endi Supardi.

Dalam kuliah umumnya, Anggota I BPK menyampaikan berbagai hal penting yang relevan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satunya adalah mengenai tugas dan wewenang BPK dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Selain mengisi kuliah umum, di hari yang sama, Anggota I BPK juga melaksanakan kegiatan *entry meeting* pemeriksaan laporan keuangan pada satuan kerja daerah/wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai objek pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I BPK.



▲
Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana mengisi kuliah umum di AAL Bumimoro, di Surabaya, Senin (19/2).

Entry meeting yang dilaksanakan di auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur tersebut, dihadiri para pimpinan satuan kerja vertikal di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) V Brawijaya, dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Jawa Timur.

Hadir mendampingi Anggota I BPK di antaranya, Auditor Utama Keuangan Negara I Akhsanul Khaq, pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan AKN I, Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Karyadi, serta para pemeriksa di lingkungan AKN I BPK.

BPK Telisik Lima Area Berisiko dalam Pemeriksaan LK



▲ Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing

Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan kementerian/lembaga difokuskan pada area yang dinilai berisiko cukup tinggi dan berdampak pada penyajian laporan keuangan tahun 2023. Setidaknya ada lima area yang menjadi fokus pemeriksaan laporan keuangan tahun 2023.

"Area yang menjadi fokus pemeriksaan BPK, di antaranya adalah pengendalian intern atas pelaporan keuangan (*internal control over financial reporting*) dalam pencatatan transaksi-transaksi keuangan dan proses penyusunan laporan keuangan," ujar Anggota II BPK dalam kegiatan *entry meeting* pemeriksaan laporan keuangan di kantor pusat BPK, di Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Selain pengendalian intern atas pelaporan keuangan, terdapat empat area yang menjadi fokus pemeriksaan laporan keuangan tahun 2023. Pertama adalah temuan-temuan yang berulang. Kedua, perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti.



▲
 Anggota II BPK/
 Pimpinan Pemeriksaan
 Keuangan Negara II
 Daniel Lumban Tobing
 menghadiri *entry
 meeting* pemeriksaan
 laporan keuangan
 di kantor pusat BPK,
 di Jakarta, Selasa
 (6/2/2024).

Ketiga, situasi dan/atau peristiwa berindikasi kecurangan dan menilai dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. "Dan keempat, pengujian atas pendapatan, belanja barang, belanja modal, dan pengelolaan barang milik negara," terangnya.

Entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian/lembaga yang akan diperiksa dan menandai dimulainya pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2023. Dalam kesempatan ini, BPK melaksanakan *entry meeting* dan menyampaikan surat tugas pemeriksaan pada lima entitas pemeriksaan di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) II.

Entitas tersebut adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Meningat jadwal yang cukup ketat, kami meminta komitmen dari seluruh jajaran KPPU, LKPP, PPATK, BSN, dan BPS yang terkait dengan pemeriksaan BPK, agar dapat menyesuaikan pelaksanaan tugasnya, sehingga pemeriksaan BPK tetap dapat berjalan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan," kata Anggota II BPK.

Entry meeting ini dihadiri oleh Ketua Komisioner KPPU Fansharullah Asa, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Kepala BSN Kukuh S Achmad, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) II Nelson Ambarita dan tim pemeriksa di lingkungan AKN II BPK.

Anggota V BPK: Opini WTP Bukan Tujuan Akhir

Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ahmadi Noor Supit menegaskan, pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara/daerah. Perbaikan tata kelola keuangan diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggota V menekankan hal tersebut saat *entry meeting* pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2023, di Balai Agung DKI Jakarta, Rabu (7/2/2024). Kegiatan ini turut dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) Heru Budi Hartono.

Ia menjelaskan, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK Pemprov DKI Jakarta selama 6 kali berturut-turut. "Namun demikian, pencapaian opini WTP bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan negara. Opini atas LK lebih merupakan target wajib pemerintah daerah yang merepresentasikan tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan," kata Anggota V.

Anggota V menambahkan, opini WTP yang telah diperoleh seharusnya dapat mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan pelayanan kebutuhan pokok masyarakat.

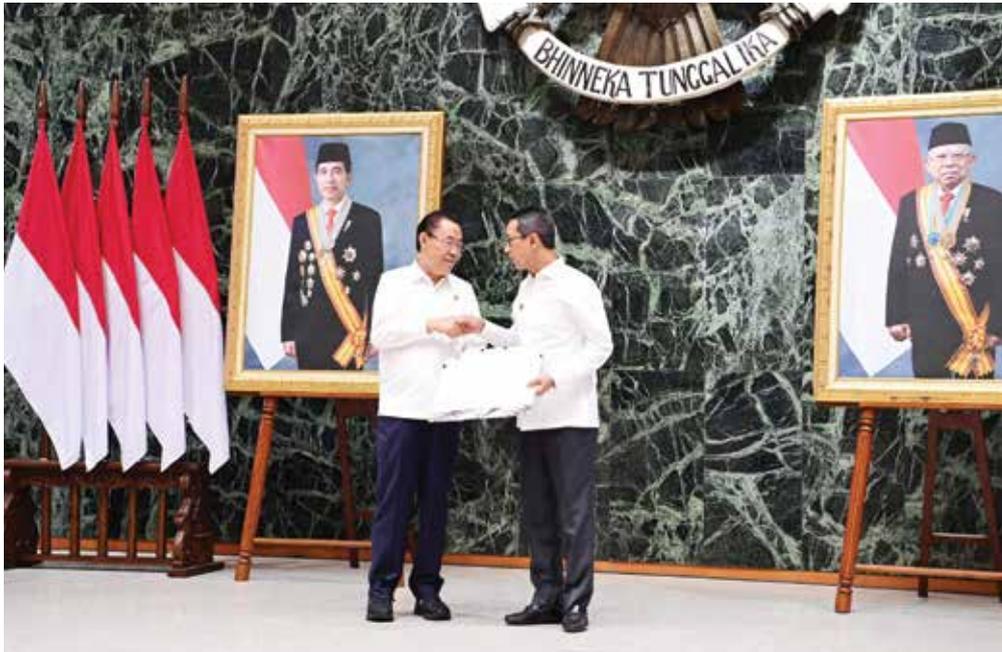
Ia mengungkapkan bahwa DKI Jakarta merupakan daerah yang sangat strategis dan menjadi barometer untuk Indonesia. Oleh karena itu, apa yang terjadi di DKI Jakarta mempunyai pengaruh sangat luas untuk provinsi-provinsi lainnya.

Pada pemeriksaan LK tahun 2023, BPK akan mencermati penggunaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, yang dinilai berisiko tinggi. Selain itu, BPK akan memfokuskan pada akun pendapatan asli daerah (PAD), belanja kontraktual dan pengelolaan aset prasarana, sarana dan fasilitas umum.

Anggota V berharap tim pemeriksa BPK dan entitas terperiksa bisa saling bersinergi dengan tetap menjaga nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalisme.

"Semoga pelaksanaan *entry meeting* ini menjadi awal yang baik bagi terciptanya kolaborasi dan sinergi BPK dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel," katanya.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyambut baik sinergi yang telah terjalin dengan BPK dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia pun mengapresiasi karena kegiatan *entry meeting* dilaksanakan lebih awal, sehingga Pemprov DKI memiliki waktu yang lebih panjang untuk melakukan perbaikan atas penyajian laporan keuangan tahun 2023.



▲
Anggota V/
Pimpinan
Pemeriksaan
Keuangan
Negara V BPK,
Ahmadi Noor Supit

◀
Penjabat (Pj)
Gubernur DKI
Jakarta Heru
Budi Hartono
menghadiri
entry meeting
pemeriksaan atas
Laporan Keuangan
(LK) Pemerintah
Provinsi (Pemprov)
DKI Jakarta tahun
anggaran 2023,
di Balai Agung
DKI Jakarta.

Heru menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan. Upaya tersebut di antaranya penguatan Sistem Pengendalian Intern, Reviu Laporan Keuangan Berbasis Risiko, Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK RI, dan Pengamanan Aset Daerah.

Heru juga berharap agar jajarannya terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari BPK RI. Jajaran Pemprov DKI Jakarta diharapkan agar kooperatif dalam menyiapkan data dan penjelasan yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa BPK RI selama masa pemeriksaan.

"Seluruh kepala perangkat daerah dan direktur Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) harus kooperatif dan responsif dalam menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa BPK RI selama masa pemeriksaan. Kedepankan prinsip kerja secara tim, berdedikasi, teliti, dan profesional," kata Heru dalam siaran pers Pemprov DKI Jakarta.

Heru juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang selama ini mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta melalui kegiatan pemeriksaan yang profesional dan pemberian rekomendasi yang membangun.

"Sinergi ini terus terjalin, sehingga Pemprov DKI Jakarta dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan memberikan yang terbaik bagi warga Jakarta," katanya.

Pemeriksaan LK Difokuskan pada Area-Area Berisiko

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memulai pemeriksaan laporan keuangan kementerian/ lembaga. Pemeriksaan atas laporan keuangan ini akan dilaksanakan dengan pendekatan audit berbasis risiko atau *risk based audit* (RBA).

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Pius Lustrilantang menjelaskan, dengan pendekatan tersebut, maka pemeriksaan akan difokuskan pada area-area yang berisiko, termasuk di dalamnya adanya potensi risiko kecurangan.

Hal ini disampaikan Pius saat menyerahkan surat tugas pemeriksaan kepada Menteri

Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai tanda dimulainya pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2023, di kantor pusat BPK, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

"Berdasarkan pendekatan tersebut, maka pemeriksaan akan difokuskan antara lain kepada belanja bantuan sosial, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemerintah daerah, belanja pada badan layanan umum (BLU), belanja barang berupa bantuan pemerintah untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional, dan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)," ungkap Anggota VI BPK dalam kegiatan *entry meeting* pemeriksaan atas laporan keuangan.



▶ Anggota VI BPK/
Pimpinan Pemeriksaan
Keuangan Negara
VI Pius Lustrilanang
menyerahkan surat
tugas pemeriksaan
kepada Menteri
Kesehatan Budi
Gunadi Sadikin
sebagai tanda
dimulainya
pemeriksaan atas
laporan keuangan
Kementerian
Kesehatan (Kemenkes)
tahun 2023, di kantor
pusat BPK, Jakarta,
Jumat (2/2).



Penggabungan berbagai sistem informasi pengelolaan keuangan pada kementerian/lembaga ke dalam SAKTI akan menghasilkan basis data yang besar. Oleh karena itu, pemeriksaan BPK akan diarahkan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

BPK berharap komitmen dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan agar membangun komunikasi dan sinergi yang efektif dengan BPK, sehingga pemenuhan data dan informasi yang dibutuhkan berjalan lancar dan tepat waktu.

"Kepada tim pemeriksa BPK, saya mengingatkan agar dalam melaksanakan pemeriksaan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme, menegakkan kode etik BPK dan bekerja sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)," tegas Anggota VI BPK.

Pada kesempatan ini, Pius juga menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang telah dilaksanakan pada semester II tahun 2023, yang terdiri atas satu pemeriksaan kinerja dan tiga pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). LHP kinerja tersebut adalah laporan hasil pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting* tahun 2022 dan 2023 pada Kementerian Kesehatan dan instansi terkait lainnya.

Sedangkan LHP DTT yang diserahkan adalah LHP atas pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2023 pada Kementerian Kesehatan di Jakarta dan Arab Saudi, LHP kepatuhan atas pelaksanaan program Indonesia Emergency Response to Covid-19 tahun 2022 dan 2023 serta LHP kepatuhan atas pelaksanaan program Indonesia-Supporting Primary Health Care Reform (I-Sphere) tahun 2022 dan 2023.

Peran BPK Sebagai Institusi Penyelaras dalam Interoperabilitas Alpalhankam TNI



I Gusti Bagus Tridarwata Yatnaputra



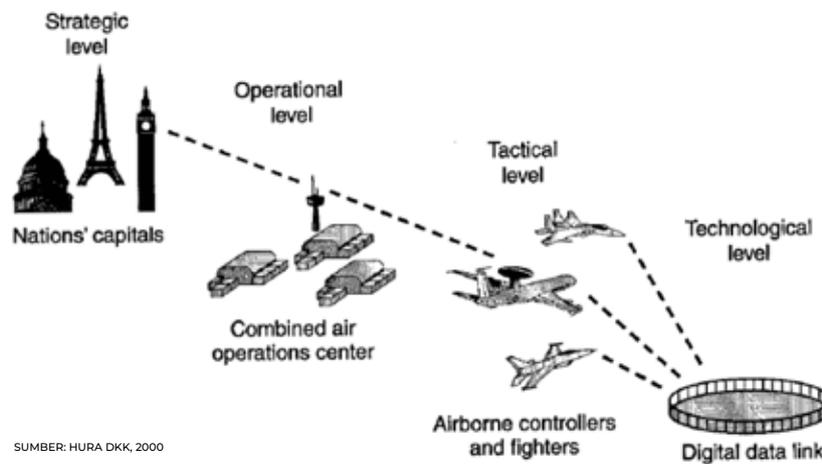
Edy Witono

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'. Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000.

1. Definisi interoperabilitas

Beberapa literatur mengungkapkan bahwa interoperabilitas berkaitan erat dengan kemampuan untuk melakukan pertukaran informasi antar unit. NATO Logistics Handbook menyatakan bahwa interoperabilitas adalah “*the ability of systems, units or forces to provide services to and accept services from other systems, units or forces and to use the services so exchanged to enable them to operate effectively together*”. Hura, dkk (2000) mengungkapkan definisi interoperabilitas yang lebih luas. Dalam laporan berjudul *Interoperability: A Continuing Challenge in Coalition Air Operations*, Hura dkk menyatakan bahwa sederhananya, interoperabilitas mengukur seberapa mampu beberapa organisasi atau individual untuk beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pengertian ini, interoperabilitas dapat menggantikan istilah standardisasi, integrasi, kerja sama, dan sinergi.

Namun demikian, Hura, dkk (2000) menekankan bahwa definisi interoperabilitas secara detail tidak ada. Interoperabilitas sangat bergantung pada situasi yang dihadapi, ada dalam berbagai bentuk dan derajat, serta dapat muncul pada berbagai level – strategis, operasional, dan taktis (teknologi). Kebutuhan akan interoperabilitas biasanya teridentifikasi saat muncul masalah terkait interoperabilitas. Berdasarkan penjelasan tersebut, interoperabilitas terbagi dalam level strategis, operasional, dan taktis. Gambar 1 menunjukkan level interoperabilitas pada kekuatan udara.



SUMBER: HURA DKK, 2000

Gambar 1 Interoperabilitas Udara di Berbagai Tingkatan

Pada level tertinggi, interoperabilitas merupakan syarat utama pembentukan koalisi. Interoperabilitas meliputi harmonisasi pandangan, strategi, doktrin, dan struktur kekuatan militer dari beberapa negara (contohnya antar negara anggota NATO). Upaya untuk mewujudkan interoperabilitas pada tingkatan ini akan sangat mahal karena dibatasi oleh kemauan untuk saling percaya antar negara. Batasan ini menghambat keterbukaan dan keterhubungan antar sistem (misalnya intelijen, navigasi, dan komunikasi).

Interoperabilitas pada level operasional dan taktis akan mewujudkan operasi yang terintegrasi serta satuan-satuan yang saling terkoordinasi. Ini dapat dicapai dengan beberapa cara, di antaranya pusat komando yang *interoperable* dengan

jaringan data yang terstandarisasi dan terkomputerisasi, sistem C5ISTAR (*Command, Control, Computers, Communications, Cyber, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance*), atau melalui teknik, prosedur, dan hubungan *ad hoc* yang mencakup penggunaan petugas penghubung secara ekstensif.

Pada level teknologi, menurut National Institute of Standards and Technology (NIST), Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), the Army Science Board, dan DoD, interoperabilitas adalah:

The capability of systems to communicate with one another and to exchange and use information including content, format, and semantics.

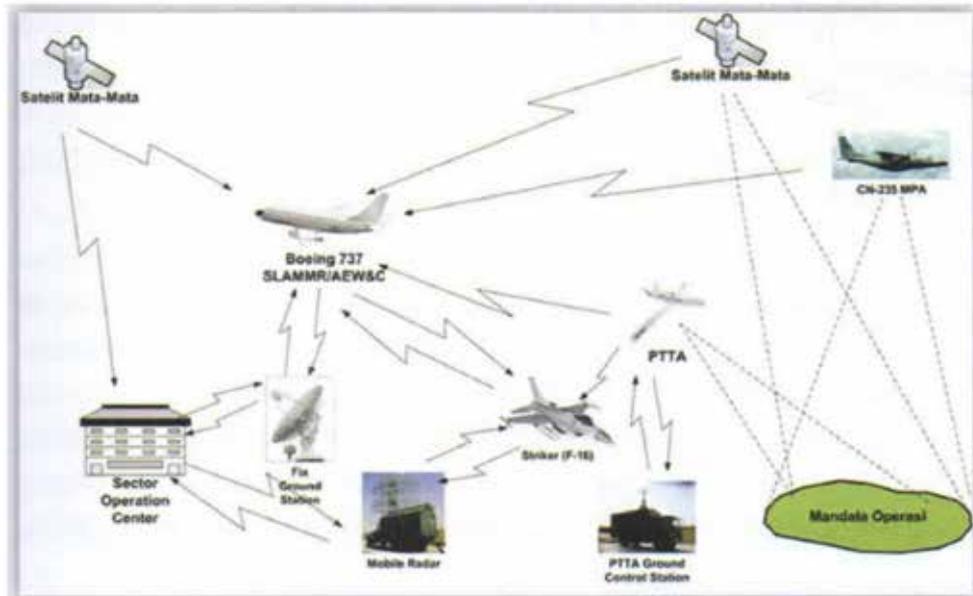
(1) The ability of two or more systems or components to exchange data and use information; (2) The ability of two or more systems to exchange information and to mutually use the information that are exchanged.

The condition achieved among communications-electronic systems or items of communications-electronics equipment when information can be exchanged directly and satisfactorily between them and/or their users. The degree of interoperability should be defined when referring to specific cases.

Definisi mengenai interoperabilitas juga disampaikan oleh Komandan Seskoad. Dalam tulisan berjudul Interoperabilitas Antar Kecabangan Dalam Mendukung Tugas Pokok TNI Angkatan Darat, Danseskoad menyatakan bahwa interoperabilitas sangat krusial guna mewujudkan kerja sama antar kecabangan agar dapat memenangkan pertempuran. Untuk itu, diperlukan sistem pendukung dalam rangka mewujudkan interoperabilitas antar kecabangan dengan mengintegrasikan sistem sensor, sistem Komando dan Pengendalian (Kodal), dan sistem senjata. Integrasi tiga sistem tersebut akan menghasilkan efektivitas komando dan pengendalian yang dibutuhkan untuk memenangkan pertempuran. Ketiga sistem tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi (Dewantara, 2018).

Dalam tulisan berjudul Meraih Interoperabilitas TNI AU: Sebuah Pendekatan Ilmiah Sederhana, Sumari (2017) mengungkapkan bahwa pada kondisi *interoperable*, alutsista memiliki peran masing-masing dan saling bertukar informasi. Ada yang berperan sebagai sensor, *information fuser/integrator*, dan *shooter*. Alutsista yang berperan sebagai sensor (misalnya CN-235 MPA, PTTA, dan satelit mata-mata) mengintai mandala operasi yang sama dan memperoleh informasi yang berbeda karena adanya variasi peralatan pada alutsista tersebut. Informasi tersebut kemudian diteruskan ke pesawat yang berperan sebagai Kodal (misalnya Boeing 737 *Airborne Early Warning & Control/AEW&C*). Pesawat ini memroses informasi dari sensor dan mengirimkan informasi kepada *shooter* (misalnya F-16) untuk melakukan operasi udara. Informasi tersebut juga dikirimkan ke Kodal darat untuk memberikan kewaspadaan situasi (*situational awareness*) yang sama. Pada skenario ini, interoperabilitas mempercepat proses pengambilan keputusan dengan mempercepat aliran informasi dari sensor ke *shooter* (Sumari, 2017). Skenario tersebut diilustrasikan pada Gambar berikut.

"Interoperabilitas pada level operasional dan taktis akan mewujudkan operasi yang terintegrasi serta satuan-satuan yang saling terkoordinasi."



SUMBER: DATUMAYA, 2017

Gambar 2 Interoperabilitas Ideal TNI AU

Irjen Kemhan dalam kegiatan *focus group discussion* dengan BPK menyampaikan bahwa inti dari Interoperabilitas dalam Alpalhankam TNI adalah Sistem alat peralatan pertahanan yang dapat dioperasikan oleh satuan tempur dengan karakteristik yang berbeda mampu berbagi pakai data secara terintegrasi, efektif dan efisien. Prinsip interoperabilitas dalam Alpalhankam dapat diselenggarakan dengan aman dan andal, dapat digunakan kembali (*reusable*), dapat dibaca (*readable*) dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri, dapat diperiksa (*auditable*), dapat diukur kinerjanya, dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya serta dapat dibagi antar sistem yang berbeda karakteristiknya (Kemhan, 2023).

Interoperabilitas mutlak dibutuhkan guna mendukung TNI yang kuat dan terintegrasi. Salah satu sasaran interoperabilitas adalah terwujudnya Postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman, antara lain melalui Penguatan latihan gabungan TNI untuk meningkatkan kemampuan *interoperability* yang didukung satu sistem *network centric warfare* (NCW) dengan memanfaatkan teknologi satelit untuk menghadapi perang modern (Wira, 2021).

2. Unsur pendukung interoperabilitas

Interoperabilitas tercipta karena adanya unsur pendukung dari tiga dimensi, yaitu teknis (peranti keras, sistem), prosedur (doktrin, prosedur operasi standar), dan manusia (bahasa, kemampuan personal). Unsur teknis berkaitan dengan sistem informasi yang digunakan. Salah satu visi militer Amerika Serikat yang tercantum pada Joint Vision 2010 adalah superioritas informasi (*information superiority*). Superioritas informasi ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan informasi kepada pasukan AS di medan perang tanpa terinterupsi (*uninterrupted flow of information*) serta di saat bersamaan menghalangi musuh untuk melakukan hal serupa. *Quadrennial Defense Review* (QDR) Tahun 1997 juga menekankan peran superioritas informasi sebagai tulang punggung inovasi militer (Chiu, 2001).

Salah satu unsur teknis yang dibutuhkan guna mewujudkan interoperabilitas adalah tautan data taktis (*tactical data link/TDL*). TDL digunakan untuk mengirim, menyampaikan, dan menerima data taktis. TDL meningkatkan *situational awareness*, membangun *tactical network*, dan mengefektifkan koordinasi dalam pertempuran. Salah satu contoh TDL yang digunakan oleh AS adalah Link 16. Link 16 mulai dikembangkan pada tahun 1975. TDL ini awalnya hanya digunakan oleh pesawat tempur AS yaitu F-14D dan F-15C. Link 16 memiliki kemampuan enkripsi, *jam-resistant*, dan *nodeless* (Hura dkk, 2000).

Unsur selanjutnya yang mendukung interoperabilitas adalah doktrin militer. Doktrin NATO, *Allied Joint Doctrine*, mengungkapkan bahwa kesamaan doktrin sangat penting guna meningkatkan interoperabilitas. Peningkatan itu terlihat di beberapa tingkatan, yaitu pada tingkatan intelektual, kesamaan doktrin memudahkan komandan satuan dari negara yang berbeda untuk mengambil pendekatan yang sama terhadap suatu operasi militer. Pada tingkatan prosedural, kesamaan doktrin juga memungkinkan integrasi kekuatan, misalnya kekuatan darat satu negara bisa meminta dan mengarahkan dukungan serangan udara dari negara lainnya (NATO, 2010).

Menurut Pusdatin Kemhan, interoperabilitas diwujudkan melalui pembangunan *Network Centric Warfare*, *Secure Network & Defense Private Cloud*, *Defense Resource Planning* (ERP), Berbagai *System Strategic* untuk Satker Kemhan Berbasis *Massive Profiling* dan *Big Data*, Aplikasi-Aplikasi Dan Subsistem Pendukung lainnya, *Office Automation & Collaboration Platform*, *ICT Governance* (SPBE), dan *Cyber Defense & Offense* (Kemhan, 2021).

3. Level kematangan interoperabilitas

Guna mewujudkan interoperabilitas di level teknis, Departemen Pertahanan AS (US DOD) menginisiasi Levels of Information Systems Interoperability (LISI) pada tahun 1993. LISI ini lahir sebagai upaya mengatasi kendala interoperabilitas pada Perang Teluk Tahun 1991. LISI adalah model referensi formal yang digunakan untuk menilai level kematangan interoperabilitas dan sekaligus berperan sebagai proses yang terstruktur guna meningkatkan interoperabilitas antar sistem informasi yang berbeda-beda. Berdasarkan kriteria LISI, terdapat beberapa level kematangan interoperabilitas yaitu (Chiu, 2001):

(1) Level 0: *isolated/stand alone*

Pada level ini, manusia melakukan intervensi sehingga terwujud interoperabilitas dari beberapa sistem yang terisolasi satu dengan yang lainnya.



SUMBER: CHIU, 2001

Gambar 3 Interoperabilitas level 0

(2) Level 1: *connected (peer-to-peer)*

Fitur kunci pada interoperabilitas ini adalah konektivitas fisik yang menyediakan interaksi langsung antar beberapa sistem. Sistem informasi level 1 memiliki *link* elektronik dengan karakteristik koneksi *peer-to-peer*. Sistem ini memiliki kapasitas terbatas dan umumnya menggunakan tipe data yang homogen (misalnya GIFF atau TIFF). Sistem ini memungkinkan pengambil keputusan untuk bertukar informasi satu-dimensi namun memiliki kemampuan yang terbatas untuk menggunakan informasi tersebut bersama-sama untuk mendukung pengambilan keputusan.



Gambar 4 Interoperabilitas level 1

(3) Level 2: *distributed (functional)*

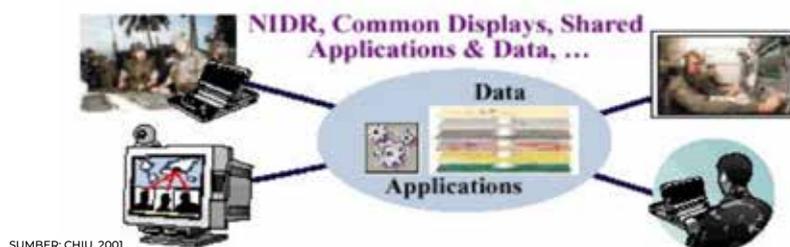
Level 2 dideskripsikan sebagai interoperabilitas fungsional pada lingkungan yang tersebar. Fitur kunci dari interoperabilitas ini adalah kemampuan aplikasi yang independent untuk bertukar dan menggunakan data secara langsung. Sistem level 2 mampu melakukan pertukaran dan pemrosesan data heterogen. Kemampuan utama dari sistem level ini adalah menyediakan akses data yang berbasis web.



Gambar 5 Interoperabilitas level 2

(4) Level 3: *Integrated (domain)*

Karakteristik level 3 adalah adanya interaksi antar aplikasi dalam sistem informasi. Sistem dan aplikasi terinterkoneksi, namun umumnya beroperasi pada fungsi tertentu (misalnya intelijen, logistik).



Gambar 6 Interoperabilitas level 3

(5) Level 4: *Networked (Enterprise)*

Pada level ini, pertukaran data berlangsung dengan mulus antar aplikasi yang bekerja secara bersama-sama pada lingkungan yang memungkinkan akses secara universal. Aplikasi dan sistem bekerja sesuai kebutuhan di seluruh fungsi yang ada. Pada sistem ini tidak akan ditemukan beberapa aplikasi dengan fungsi yang sama karena seperti data, aplikasi juga bisa di-*share* pada sistem ini.



Gambar 7 Interoperabilitas level 4

Perbandingan antar level kematangan interoperabilitas dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Perbandingan tingkat kematangan interoperabilitas

4	<i>Enterprise</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Cross-domain information and advanced collaboration</i> ● <i>Interactive manipulation of shared data and applications</i>
3	<i>Domain</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Shared data but separate applications</i> ● <i>Sophisticated collaboration</i>
2	<i>Functional</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Minimal common functions, separate data and applications</i> ● <i>Heterogenous product exchange</i> ● <i>Basic collaboration</i>
1	<i>Connected</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Electronic connected, separate data and applications</i> ● <i>Homogenous product exchange</i>
0	<i>Isolated</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Non-connected</i> ● <i>Homogenous product exchange</i>

SUMBER: KASUNIC, 2003

4. Contoh penerapan interoperabilitas

Pada tahun 2020, Rand Corporation, sebuah lembaga *think tank* AS di bidang militer, mempublikasikan tulisan berjudul “Chasing Multinational Interoperability”. Tulisan tersebut mencantumkan beberapa contoh interoperabilitas yang telah dicapai AS bersama negara sekutunya, antara lain sebagai berikut (Pernin dkk, 2020).

(1) *Partner-driven*

Kerja sama yang terjalin antara Divisi Lintas Udara 82 AS dan Brigade Lintas Udara 16 Inggris menciptakan interoperabilitas di antara dua satuan tersebut. Interoperabilitas tersebut meningkatkan kemampuan respon cepat saat terjadi situasi darurat secara global. Bersama-sama, kedua satuan ini berkontribusi terhadap *Very High-Readiness Joint Task Force* (VJTF), sebuah unit reaksi cepat NATO.

(2) *Function-driven*

Selama Dynamic Front 18, latihan tahunan antara AS dengan sekutunya di Eropa, tim pendukung pada Resimen Kavaleri 2 US Army Europe (USAREUR) berperan sebagai pengintai untuk penembakan yang dilakukan oleh Brigade Artileri 1 British Royal Army. Proses ini membutuhkan transmisi data penembakan secara digital melalui jaringan yang menghubungkan kedua satuan tersebut.

Contoh lain pengembangan kemampuan bersama untuk mencapai fungsi tertentu adalah pembangunan sistem pertahanan rudal regional di Timur Tengah antara AS dan negara sekutunya. Sejak pemerintahan Bill Clinton, AS telah mengadvokasi pembangunan sistem pertahanan regional yang terintegrasi dengan memanfaatkan kekuatan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama untuk Negara Arab di Kawasan Teluk (*Gulf Cooperation Council/GCC*) dan Mesir.

(3) *Scenario-driven*

Interoperabilitas yang dibangun untuk menjalankan skenario tertentu jarang dijumpai. Salah satu contoh interoperabilitas ini adalah operasi koalisi di Afghanistan, yaitu NATO Rolute Support Mission. Operasi ini diluncurkan pada bulan Januari 2015, setelah berakhirnya International Security Assistance Force pada bulan Desember 2014. Pada periode tersebut, tanggung jawab keamanan di Afghanistan diserahkan kepada pasukan keamanan nasional Afghanistan. Operasi yang melibatkan 39.000 personil dari 39 negara ini memungkinkan AS untuk mengurangi sumber dayanya dan sekaligus memanfaatkan kemampuan negara sekutunya, misalnya Inggris dalam hal pemerintahan dan pembangunan.

"Interoperabilitas tercipta karena adanya unsur pendukung dari tiga dimensi, yaitu teknis (peranti keras, sistem), prosedur (doktrin, prosedur operasi standar), dan manusia (bahasa, kemampuan personil)."

5. Kondisi interoperabilitas TNI

Berdasarkan beberapa tulisan, TNI membutuhkan pengembangan interoperabilitas. Rusliana dkk (2022) mengidentifikasi kelemahan interoperabilitas pada operasi Combat SAR TNI AU. Operasi ini bertujuan untuk menyelamatkan personil, peralatan, dan dokumen di daerah operasi. Combat SAR melibatkan personil dari Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) dan elemen pesawat udara (baik pesawat tempur maupun helikopter). Beberapa kelemahan yang teridentifikasi di antaranya:

- Tim Combat SAR tidak memiliki kemampuan Ground Forward Air Control (GFAC)

Kemampuan GFAC ini dibutuhkan untuk mengendalikan pesawat tempur yang mengawal misi SAR dan helikopter yang menjalankan misi Combat SAR sambil memberikan dukungan udara jarak dekat atau *Close Air Support (CAS)*. CAS mensyaratkan bahwa pasukan darat dapat berkomunikasi dengan pasukan udara guna mendapatkan dukungan serangan udara secara tepat waktu dan akurat.

- Kurangnya latihan bersama dengan elemen pesawat udara
- Peralatan khusus dan infrastruktur yang terbatas
- Tidak adanya peranti lunak yang mendukung interoperabilitas antara tim Combat SAR Kopasgat dengan pesawat tempur dan helikopter.

Rahadian (2019) mengungkapkan bahwa Indonesia belum bisa mewujudkan interoperabilitas alutsista TNI secara optimal. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Pertama, negosiasi yang alot dengan negara yang menguasai teknologi TDL yaitu AS. Sebagai upaya melindungi teknologinya, AS tidak mengizinkan TDL untuk digunakan ke dalam alutsista yang berasal dari blok Timur (contohnya Rusia). Kedua, SDM TNI yang masih perlu dikembangkan untuk mengoperasikan TDL. Ketiga, penambahan TDL membutuhkan anggaran yang besar. Keempat, TNI membutuhkan pengembangan *Concept of Operation (CONOPS)* guna mendukung pelaksanaan operasi gabungan antar Matra. CONOPS akan berperan dalam memandu pengembangan interoperabilitas yang dibutuhkan.

6. BPK sebagai penyelaras

Organisasi TNI adalah salah satu organisasi yang paling kompleks di Indonesia. Secara anggaran, TNI menginduk pada Kementerian Pertahanan (Kemhan). Kemhan dan TNI terdiri atas lima Unit Organisasi (UO), yaitu UO Kemhan, UO Mabes TNI, UO TNI AD, UO TNI AL, dan UO TNI AU. Berdasarkan Permenhan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara, Pengguna Anggaran Kemhan dan TNI adalah Menteri Pertahanan. Masing-masing UO memiliki Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu Sekjen Kemhan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan. Sebagai PA, Menhan memiliki kewenangan menyusun kebijakan perencanaan anggaran Kemhan dan TNI. Prosedur perencanaan anggaran TNI berjalan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kemhan.

UU TNI pun mengatur kedudukan antara Kemhan dan TNI. Pasal 3 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Dalam hal penggunaan kekuatan TNI, Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara itu, dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan (sekarang Kemhan). Panglima TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara (dalam hal ini yang ditetapkan oleh Menhan). Salah satu contoh dari kebijakan pertahanan negara ini adalah penyusunan Postur TNI. Postur TNI harus berpedoman pada Postur Pertahanan Negara yang disahkan oleh Menhan. Postur TNI ini yang menentukan arah pembangunan militer (personil, materiil, dan fasilitas) dan penggelaran kekuatan TNI ke depan.

Selain mengatur hubungan koordinasi antara Kemhan dan TNI, UU TNI juga mengatur kedudukan antara Mabes TNI dan Mabes Angkatan (Darat, Laut, dan Udara). Pasal 14 menyebutkan bahwa Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan dan berkedudukan di bawah Panglima serta bertanggung jawab kepada Panglima. Dalam pelaksanaan operasi militer, Panglima TNI berwenang menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI. Sementara itu, tugas Kepala Staf bukan dalam hal penggunaan kekuatan TNI, melainkan dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional Angkatan.

Dalam hal pengadaan alpalhankam, Kemhan dan TNI berpedoman pada Permenhan Nomor 16 Tahun 2019. Aturan tersebut mengikuti Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara dalam hal menetapkan Kepala UO sebagai KPA. Selanjutnya PA maupun KPA dapat menetapkan PPK untuk melaksanakan pengadaan alpalhankam. Masing-masing UO juga bisa membentuk Unit Kerja Pengadaan (UKP) yang memiliki fungsi utama mengelola pengadaan alpalhankam. Karena itu, pengadaan alpalhankam bisa dilakukan oleh seluruh UO di lingkup Kemhan dan TNI. Namun demikian, untuk pengadaan dengan nilai di atas 100 milyar, rekomendasi calon pemenang diberikan oleh Tim Evaluasi Pengadaan yang dibentuk oleh Menhan selaku PA.

Kompleksitas jalur koordinasi dan kedudukan antara Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan salah satunya mengakibatkan panjangnya birokrasi pengadaan mulai dari pengajuan kebutuhan oleh UO sampai penetapan

"Kompleksitas jalur koordinasi dan kedudukan antara Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan salah satunya mengakibatkan panjangnya birokrasi pengadaan mulai dari pengajuan kebutuhan oleh UO sampai penetapan anggaran oleh Kemhan."

anggaran oleh Kemhan. Kondisi ini telah beberapa kali menimbulkan friksi dalam proses pengadaan alpalhankam, di antaranya:

- a. Pembelian Helikopter AgustaWestland-101 oleh Mabes TNI AU pada tahun 2016. Pembelian tersebut kemudian secara sepihak dibatalkan oleh Mabes TNI karena adanya dugaan *mark-up* dan kesalahan prosedur (BBC, 2016).
- b. Pengadaan Pesawat Tanker Airbus A400M oleh Kemhan, yang berlaku efektif sejak tahun 2022. Pesawat ini tidak dapat melakukan pengisian bahan bakar di udara untuk pesawat F-16 TNI AU karena memiliki sistem pengisian yang berbeda (Indomiliter, 2021).
- c. Pengadaan Frigate Merah Putih (Arrowhead 140) Kemhan untuk TNI AL, yang berlaku efektif sejak tahun 2021. Kemhan berencana memasang Combat Management System (CMS) Advent dari Havelsan Turki pada frigate Merah Putih ini, sementara TNI AL menginginkan penggunaan CMS Thales, yang saat ini dominan digunakan oleh TNI AL (Indomiliter, 2023).

Di samping hambatan birokrasi, kemandirian TNI juga terhambat oleh hubungan antar pucuk pimpinan di lingkungan Kemhan dan TNI yang tidak selalu berjalan secara harmonis. Beberapa isu yang pernah menjadi sorotan masyarakat di antaranya:

- a. Pada tahun 2017, Menhan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bersilang pendapat mengenai kewenangan Panglima TNI dalam perencanaan anggaran. Panglima TNI menyatakan tidak bisa melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan penggunaan anggaran di setiap Angkatan karena kewenangannya dipangkas dalam Permenhan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara. Sementara itu, Menhan menyatakan bahwa semua pihak memiliki kewenangan sesuai dengan porsinya dalam hal anggaran dan Menhan memang menduduki peran sebagai Pengguna Anggaran sesuai aturan yang ada (JawaPos, 2017).
- b. Pada tahun 2021, muncul isu ketidakharmonisan antara Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kasad Jenderal Andika Perkasa. Selama menjabat sebagai Kasad, Jenderal Andika Perkasa jarang menghadiri acara di Mabes Cilangkap yang diadakan oleh Marsekal Hadi Tjahjanto. Puncaknya, tidak seperti pergantian Panglima TNI sebelumnya, Jenderal Andika Perkasa tidak didampingi oleh Marsekal Hadi Tjahjanto saat menghadiri uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) Panglima TNI di Komisi I DPR pada tanggal 6 November 2021 (Republika, 2021).

- c. Pada tahun 2022, isu ketidakharmonisan juga mengemuka antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasad Jenderal Dudung Abdurachman. Isu ini muncul pada rapat kerja Komisi I DPR dengan Panglima TNI (Detik, 2022).

Kompleksitas hubungan dan kedudukan antar UO di lingkungan Kemhan dan TNI serta timbulnya friksi-friksi tersebut menghambat TNI dalam mewujudkan Tri Matra Terpadu, khususnya interoperabilitas TNI. Karena itu, penulis berpendapat bahwa TNI membutuhkan faktor pengungkit eksternal guna meraih kemanunggalan (khususnya interoperabilitas). Salah satu faktor eksternal tersebut adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Pasal 69 UU TNI mengamanatkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hal ini sudah dilakukan oleh BPK melalui pemeriksaan. Melalui pemeriksaan, BPK mampu berperan menyelaraskan langkah seluruh matra yang bernaung di bawah Kemhan TNI dan menghambat tumbuhnya ego matra tertentu. Rekomendasi BPK dapat dimanfaatkan sebagai instrumen penyama langkah untuk mengingatkan matra yang keluar jalur untuk kembali ke barisan, khususnya dalam mencapai pengadaan alpalhankam yang *interoperable*.

Adapun peran BPK dalam mendorong peningkatan interoperabilitas alpalhankam TNI antara lain melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan atas manajemen alpalhankam dan pemenuhan alutsista

BPK sesuai mandatnya, melalui pemeriksanaan, baik pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan Pemeriksaan Kinerja menjadikan Aspek Interoperabilitas sebagai salah satu sasaran, dan memberikan rekomendasi kepada Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan guna mewujudkan interoperabilitas alpalhankam TNI.

Salah satu aspek yang sangat krusial dalam mempertahankan interoperabilitas adalah pemeliharaan atas peranti lunak yang digunakan untuk mendukung interoperabilitas. Biasanya, peranti lunak membutuhkan perpanjangan lisensi agar tetap bisa dipergunakan. Karena itu, kegiatan pemeliharaan tersebut harus menjadi perhatian pada proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran.

- b. Kegiatan *Entry Meeting* Pemeriksaan atas Manajemen Alpalhankam

Dalam setiap kesempatan kegiatan *entry meeting* pemeriksaan, aspek interoperabilitas, menjadi salah satu aspek penting yang ditekankan untuk menjadi perhatian bagi *auditee* dalam pengadaan alpalhankam (Puspenerbal, 2023).

- c. *Focus Group Discussion* (FGD) membahas Aspek Interoperabilitas

BPK menyelenggarakan FGD untuk dapat memahami lebih dalam tentang interoperabilitas alpalhankam TNI, upaya yang telah dilakukan dan tantangan atau kendala yang dihadapi baik pada tataran kebijakan ataupun operasionalnya.

Salah satu peran yang pernah dijalankan oleh BPK untuk kepentingan transformasi TNI terutama dalam hal peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah melalui pemberian pendapat BPK. Pada tahun

2018, BPK menerbitkan Pendapat kepada Presiden yang mendorong agar pelaksanaan anggaran Kemhan dan TNI mengikuti tata cara pelaksanaan APBN yang ditetapkan pemerintah. Atas dorongan BPK, Kemhan dan TNI melakukan penyesuaian atas pelaksanaan anggaran di lingkungannya hingga mengikuti aturan dari Kemenkeu. Hal ini diwujudkan dengan mencabut aturan yang bertentangan dengan PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di antaranya DIPA Petikan Satker Pusat dan mekanisme otorisasi berjenjang.

Pemeriksaan pada sektor pertahanan tidak hanya dilakukan oleh BPK, tetapi juga oleh *Supreme Audit Institution* (SAI) di negara lain. Australian National Audit Office (ANAO) adalah salah satunya. Saat ini ANAO sedang melakukan beberapa pemeriksaan kinerja atas sektor pertahanan, di antaranya (ANAO, 2023):

- a. Administrasi kontrak pertahanan, untuk menilai efektivitas kewajiban kontraktual sektor pertahanan dalam hubungannya dengan program Australian Industry Capability (AIC);
- b. Bantuan pertahanan terhadap komunitas sipil, untuk menilai efektivitas perencanaan dan pengaturan administrasi Department of Defence (DOD) untuk membantu penanggulangan kondisi darurat;
- c. Manajemen pengadaan munisi, untuk menilai efektivitas pengadaan munisi;
- d. Pemeliharaan kapal amfibi kelas Canberra, untuk menilai efektivitas dan efisiensi program.

Selain itu, ANAO juga berencana melakukan beberapa pemeriksaan atas sektor pertahanan pada tahun 2023 – 2024, di antaranya (ANAO, 2023):

- a. Perencanaan dan pelaksanaan perpanjangan masa operasi (*life-of-type extension*/LOTE) kapal selam kelas Collins;
- b. Implementasi Defence Strategic Review oleh DOD;
- c. Pengelolaan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dari Australian Defence Force (ADF) guna mewujudkan keamanan siber (*cyber security*).

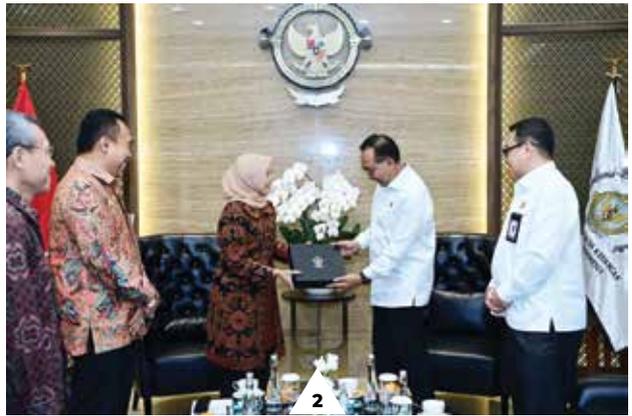
Dalam hal mewujudkan interoperabilitas TNI, BPK dapat melakukan pemeriksaan kinerja guna menilai level kematangan interoperabilitas TNI sesuai dengan Levels of Information Systems Interoperability (LISI) di atas. Atas dasar penilaian tersebut, BPK dapat memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan level interoperabilitas TNI. Pemeriksaan juga bisa dilakukan terhadap pengadaan alpalhankam yang tidak memenuhi prinsip interoperabilitas. Untuk kondisi ini, pemeriksaan terhadap perencanaan pengadaan akan bernilai strategis guna mengungkap sumber masalah tidak tercapainya interoperabilitas. Pemeriksaan tidak hanya sebatas menguji kesesuaian spesifikasi barang dengan kontrak, tetapi juga kesesuaian antara spesifikasi kontrak dengan kebutuhan operasi (*operational requirement*) TNI. Penulis berpendapat bahwa BPK adalah salah satu institusi eksternal yang paling mampu (karena alasan historis dan legal yang diungkapkan di atas) untuk menjadi institusi penyelaras dan mendorong peningkatan interoperabilitas TNI.

DAFTAR PUSTAKA

- Australian National Audit Office (ANAO). 2023. *Annual Audit Work Program: Defence portfolio*. Diakses tanggal 15 September 2023. <<https://www.anao.gov.au/work-program/portfolio/defence>>.
- BBC. 2016. *TNI batalkan pembelian helikopter AW 101*. Diakses tanggal 11 September 2023. <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38456287>>.
- Chiu, S. 2001. *Can Level of Information Systems Interoperability (LISI) Improve DOD C4I Systems' Interoperability?* Thesis. Naval Postgraduate School.
- Detik. 2022. *Blak-blakan KSAD Dudung Ngaku Berselisih dengan Panglima TNI Andika Perkasa*. Diakses tanggal 11 September 2023. <<https://www.detik.com/sulse/hukum-dan-kriminal/d-6292736/blak-blakan-ksad-dudung-ngaku-berselisih-dengan-panglima-tni-andika-perkasa>>.
- Dewantara, K. 2018. *Interoperabilitas Antar Kecabangan Dalam Mendukung Tugas Pokok TNI Angkatan Darat*.
- Hura, M, McLeod, G, Larson, E, Schneider, J, Gonzales, D, Norton, D, Jacobs, J, O'Connell, K, Little, W, Mesic, R, & Jamison, L. 2000. *Interoperability: A Continuing Challenge in Coalition Air Operations*. RAND Project Air Force.
- Indomiliter. 2021. *Saat Menjadi Pesawat Tanker, Inilah Kemampuan A400M Atlas*. Diakses tanggal 11 September 2023. <<https://www.indomiliter.com/saat-menjadi-pesawat-tanker-inilah-kemampuan-a400m-atlas/>>.
- Indomiliter. 2023. *Kemhan Dan TNI AL 'Beda Pilihan' Tentang Combat Management System (CMS) Di Frigate Merah Putih*. Diakses tanggal 11 September 2023. <<https://www.indomiliter.com/kemhan-dan-tni-al-beda-pilihan-tentang-combat-management-system-cms-di-frigate-merah-putih/>>.
- JawaPos. 2017. *Panglima TNI Buka-bukaan, Menhan: Jangan Buat Saya Ribut!* Diakses tanggal 11 September 2023. <<https://www.jawapos.com/hankam/01146772/panglima-tni-bukabukan-menhan-jangan-buat-saya-ribut>>.
- Kasunic, M. 2003. *Measuring Systems Interoperability*. Dipresentasikan pada Conference on the Acquisition of Software-Intensive Systems.
- Kemhan. 2021. *Rakornis Pusdatin Kemhan TA. 2021 untuk Mewujudkan Interoperability Satu Data Pertahanan Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan*. Diakses tanggal 26 Februari 2024. <<https://www.kemhan.go.id/pusdatin/2021/02/17/rakornis-pusdatin-kemhan-ta-2021-untuk-mewujudkan-interoperability-satu-data-pertahanan-kemhan-mabes-tni-dan-angkatan.html>>.
- Kemhan. 2023. *Focus Group Discussion oleh Irjen Kemhan di BPK RI*. Diakses tanggal 26 Februari 2024. <<https://www.kemhan.go.id/itjen/2023/07/20/focus-group-discussion-oleh-irjen-kemhan-di-bpk-ri.html>>.
- NATO. 2010. *Allied Joint Doctrine*.
- Pernin, CG, O'Mahony, A, Germanovich, G, & Lane, M. 2020. *Chasing Multinational Interoperability: Benefits, Objectives, and Strategies*. RAND Corporation.
- Puspenerbal. 2023. *Tiga hari kedepan, Puspenerbal terima dan jalanin pemeriksaan BPK RI*. Diakses tanggal 26 Februari 2024. <<https://puspenerbal.tnial.mil.id/Penerbangan/Baca/Tiga-Hari-Kedepan,-Puspenerbal-Terima-dan-Jalanin-Pemeriksaan-BPK-Ri.html>>.
- Rahadian, H. *Urgensi Sistem Link 16 Sebagai Penunjang Interoperabilitas TNI di Lapangan*. Jurnal Defendonesia Volume 4.
- Republika. 2021. *Dulu Gatot Antar Hadi ke DPR, Kini Andika tak Diantar Hadi*. Diakses tanggal 11 September 2023. <<https://news.republika.co.id/berita/r28357484/dulu-gatot-antar-hadi-ke-dpr-kini-andika-tak-diantar-hadi>>.
- Rusliana, RR, Dwiyanto, H, & Mansyah, A. 2022. *Interoperability of Command Troops with Combat Aircraft and Helicopter Personnel in Supporting Combat Search and Rescue Operations*. Jurnal Strategi Pertahanan Udara Volume 8.
- Sumari, ADW. 2017. *Meraih Interoperabilitas TNI AU: Sebuah Pendekatan Ilmiah Sederhana*. Angkasa Cendekia. Edisi April 2017.
- Wira. 2021. *Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 – 2024*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Diakses tanggal 26 Februari 2024. <<https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2021/06/WIRA-MASTER-JAN-FEB2021-rev-JAKUMHANEG-19april2021INDONESIAKomplit.pdf>>



1



2



3



4



5

1-3 Audiensi Ketua BPK, Isma Yatus dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta, 6 Februari 2024.

4-5 Ketua BPK, Isma Yatus memberikan *keynote speech* kepada wisudawan Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE) BPKP, 12 Februari 2024.



6



7



8



9



10



11

6-11 Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto menghadiri acara *coffee morning* dengan pengurus Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK di Gedung Badiklat PKN, Kalibata, Jakarta, 26 Februari 2024.



12



16



13



14



15



17



18



19

12-16 Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Haerul Saleh melakukan kunjungan dinas guna memantau proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sekitarnya, 21 Februari 2024.

17-19 Kunjungan lapangan ke KPC Sangata (batubara) oleh Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Haerul Saleh, Kalimantan Timur, 22 Februari 2024.



20



21



22



23



24



25



26

20-23 Penyerahan LK BP Batam oleh Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Ahmadi Noor Supit, 16 Februari 2024.

24-26 Entry meeting atas LK BPOM dihadiri oleh Anggota VI/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Pius Lustrilanang, 2 Februari 2024.



- 27** Audiensi Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Slamet Edy Purnomo dengan Direksi PLN di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta, 1 Februari 2024.
- 28** Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Slamet Edy Purnomo menghadiri audiensi dengan Direksi PT DI di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta, 2 Februari 2024.
- 29-31** Audiensi Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Slamet Edy Purnomo dengan Direksi PT INKA di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta, 2 Februari 2024.



KUIS

Pada *Warta Pemeriksa* edisi Januari 2024 disebutkan bahwa BPK Perwakilan Kalimantan Barat meraih Juara Ketiga LHP Terbaik.

Apakah judul LHP yang mendapatkan penghargaan tersebut?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.



Pengamanan *Password*

* Gunakan *password* yang kuat
Panjang *password* minimal 8 karakter.

* Menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil dan angka.



* Tidak menggunakan kata yang mudah ditebak atau terdapat dalam kamus.

* Tidak menggunakan angka atau kata yang bermakna identitas diri
Contoh : tanggal lahir, NIP, nama anak, nama binatang peliharaan, dan sebagainya.

Jaga Keamanan Password

* Tidak berbagi *password* dengan orang lain.

* Tidak menggunakan *password* yang sama untuk sistem/aplikasi yang berbeda.
Contoh: menggunakan *password* yang berbeda untuk medsos dan akun BPK.

* Tidak menuliskan *password* di kertas/ media lain yang terlihat dengan mudah.

* Logout dari aplikasi yang sudah tidak digunakan.



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



BPK RI Official



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)



wartapemeriksa.bpk.go.id



SUKSESKAN PEMILU 2024



SUARA RAKYAT, SUARA PEMILU



SURA

(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI



SULU

(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



BPK RI Official [@humasbpkri.official](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[@bpkri](https://www.facebook.com/bpkri)



[@bpkri](https://www.tiktok.com/@bpkri)



wartapemeriksa.bpk.go.id